

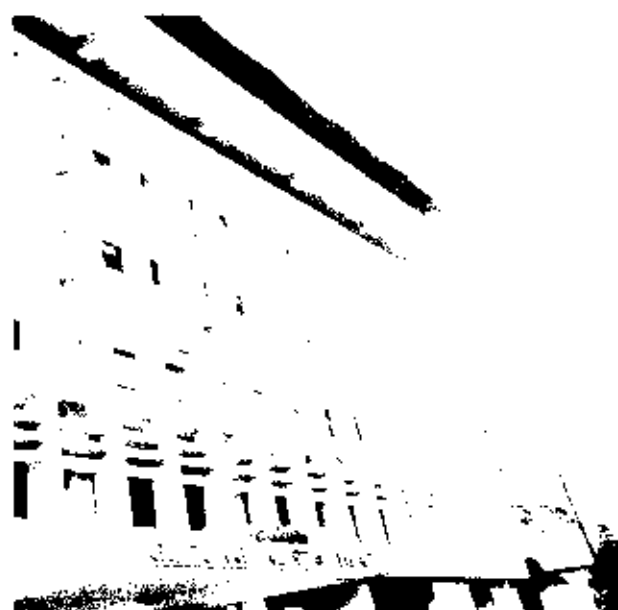


**PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS SUMBER DAYA AIR**

Jl. Braga No. 137 Bandung
Telp. (022) 4215243 / 4236113 Fax. (022) 4215243 / 4219849
Email : dispsda@jabarprov.go.id Website : www.psda.jabarprov.go.id

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

**DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH S.W.T. bahwa *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2016* dapat diselesaikan tepat pada waktunya, yang walaupun dalam proses penyusunannya masih terdapat hal-hal yang belum dianggap sempurna, hal ini tidak menjadikan suatu beban akan tetapi merupakan suatu motivasi bahwa untuk penyusunan di masa yang akan datang system pelaporan ini harus lebih baik daripada saat ini, sekalipun demikian kami telah berusaha seoptimal mungkin untuk menyajikan laporan ini dengan sebaik-baiknya.

Sebagaimana dalam Inpres RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dilakukan Pengukuran Pencapaian Kinerja di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Sistematika laporan ini mengacu pada Buku petunjuk Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) dengan Peraturan MENPAN-RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bahan yang disampaikan dalam penyusunan laporan ini, adalah berdasarkan data yang ada di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, juga termasuk UPTD yang dalam hal ini Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) Wilayah Sungai serta Balai Pusat Data dan Informasi SDA yang ada di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.

Dengan keterbatasan data yang ada, kami menyadari bahwa Laporan ini masih memerlukan penyempurnaan sehingga kami menganggap perlu adanya masukan-masukan serta saran – saran untuk mencapai kesempurnaan dalam pembuatan Laporan ini.

Akhirnya kami sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu menyelesaikan penyusunan laporan ini, semoga laporan ini dapat dipergunakan dan bermanfaat.

Bandung, 22 Februari 2017

**KERALA DINAS SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA BARAT**



NANA NASUHA DJUHRI, Sp.1
Perencana Utama Muda
NIP. 19581223 198211 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 LATAR BELAKANG	I-1
1.2 DASAR HUKUM	I-1
1.3 TUJUAN	I-2
1.4 GAMBARAN UMUM	I-2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2013-2018	II-1
2.1.1 Visi	II-1
2.1.2 Misi	II-2
2.1.3 Tujuan	II-3
2.1.4 Sasaran	II-4
2.1.5 Strategi dan Arah Kebijakan	II-5
2.1.6 Program dan Kegiatan	II-6
2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016	II-11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	III-1
3.1.1 Capaian Kinerja	III-1
3.1.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi	III-4
3.1.3 Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran	III-6
3.1.4 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan	III-10
3.2 REALISASI ANGGARAN	III-11
3.3 PRESTASI TAHUN 2016	III-14
BAB IV PENUTUP	IV-1
4.1 KESIMPULAN	IV-1
4.2 TINDAK LANJUT 2018	IV-2

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN – I

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN – II

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN – III

RENCANA KINERJA TAHUN 2016

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN – IV

PIAGAM PENGHARGAAN TAHUN 2016

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

PROVINSI JAWA BARAT

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Matrik Hubungan Antara Misi dan Tujuan	II-3
Tabel 2.2	Matrik Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Strategis	II-5
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Dinas Tahun 2016.....	II-12
Tabel 2.4	Belanja Langsung APBD Dinas PSDA Tahun 2016.....	II-13
Tabel 2.5	Penganggaran Kinerja Tahun 2016.....	II-14
Tabel 3.1	Pencapaian Kinerja Tahun 2016.....	III-1
Tabel 3.2	Perbandingan Capaian Kinerja.....	III-2
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD	III-3
Tabel 3.4	Anggaran Belanja APBD Tahun 2016.....	III-6
Tabel 3.5	Alokasi Per Sasaran Pembangunan.....	III-7
Tabel 3.6	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	III-8
Tabel 3.7	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	III-9
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran Tahun 2016.....	III-12
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran Per Indikator Tahun 2016.....	III-13

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik.

Evaluasi pada tahun 2016 perlu dilakukan untuk mengetahui dan menilai capaian yang telah dihasilkan. Evaluasi berguna untuk menyusun perencanaan tahun-tahun berikutnya sebagai bahan pertimbangan dan bahan masukan.

Visi dan Misi

Visi adalah gambaran atau pandangan masa depan atau cita-cita yang ingin dicapai oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, sebagai harapan yang ideal dan memungkinkan untuk diwujudkan. Visi yang ditetapkan adalah :

“INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI YANG ANDAL DAN BERKELANJUTAN”

Misi adalah pernyataan komprehensif tentang hal-hal yang hendak dicapai Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dalam rangka mewujudkan visi. Misi yang ditetapkan adalah :

1. Mengembangkan kebijakan operasional Pengelolaan Sumber Daya Air.
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.
3. Meningkatkan upaya konservasi SDA, pendayagunaan SDA dan pengendalian daya rusak air.
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan irigasi.
5. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data sistem informasi Sumber Daya Air.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan pada Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan 1 Memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan fungsi sumber air dan memperhatikan lingkungan sumber air :
 - Indikator Kinerja Prosentase rekomendasi teknis pengajuan SIPPA yang diselesaikan tepat waktu mendapatkan capaian sebesar 100%
 - Indikator Kinerja Prosentase intensitas tanam pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang terairi dalam 3 musim tanam mendapatkan capaian sebesar 100%
2. Tujuan 2 Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pengelola sumber daya air dan terciptanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air :
 - Indikator Kinerja Partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan Sumber Daya Air mendapatkan capaian sebesar 100%

- Indikator Kinerja Prosentase pengelola Sumber Daya Air dan irigasi yang mengikuti diklat mendapatkan capaian sebesar 88,50%
3. Tujuan 3 Menjaga kelangsungan kondisi dan fungsi sumber air dan infrastruktur sumber daya air :
- Indikator Kinerja Bertambahnya kapasitas tampung situ-situ di WS. Kewenangan Provinsi mendapatkan capaian sebesar 354,93%
 - Indikator Kinerja Prosentase infrastruktur Sumber Daya Air dan irigasi yang terkena bencana alam yang berhasil direhabilitasi mendapatkan capaian sebesar 100%
4. Tujuan 4 Mewujudkan jaringan irigasi yang mampu mengalirkan debit air sesuai kebutuhan:
- Indikator Kinerja Prosentase jaringan irigasi kewenangan provinsi dalam kondisi baik mendapatkan capaian sebesar 100,01%
5. Tujuan 5 Mewujudkan jaringan irigasi yang mampu mengalirkan debit air sesuai kebutuhan:
- Indikator Kinerja Akurasi data dalam Sistem Informasi Sumber Daya Air mendapatkan capaian sebesar 97,95%
 - Indikator Kinerja Prosentase Data Sumber Daya Air yang dilayani mendapatkan capaian sebesar 100%

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara adil dan merata, pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar Tahun 1945, yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan bahwa :

- Air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai manfaat serbaguna dan dibutuhkan manusia sepanjang masa, baik di bidang ekonomi maupun sosial budaya;
- Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat secara adil dan merata;
- Pemanfaatannya haruslah diabdikan kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat yang sekaligus menciptakan pertumbuhan, keadilan social dan kemampuan untuk berdiri atas kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila

Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih merupakan prasyarat untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam tujuan berbangsa dan bernegara. *Good Governance* merupakan system pengelolaan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabel. Untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel maka setiap bagian dalam organisasi pemerintahan harus dapat menyajikan kinerja yang dapat diukur dan dinilai oleh segenap masyarakat.

Dengan memperhatikan sumberdaya air serta keadaan lingkungan yang dihadapi, cara untuk menghadapi tujuan dan sasaran secara konsisten disusun dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang relevan serta merupakan rencana menyeluruh dan terpadu dalam rangka menciptakan Pemerintahan yang baik.

1.2. DASAR HUKUM

Sebagai Dasar Hukum daripada pembuatan laporan ini maka disusun berdasarkan landasan sebagai berikut :

- a. Landasan Idiil, yaitu Pancasila
- b. Landasan Konstitusional, yaitu Undang-undang Dasar 1945.
- c. Landasan Operasional, yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Pusat dan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Inpres No 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Kep.LAN No.239 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menpan No.29/2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat; Rencana Strategi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018; Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Tahun 2016; dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 .

1.3. TUJUAN

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.

1.4. GAMBARAN UMUM

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741), maka pembentukan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat disempurnakan lagi dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat

(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah No. 55) dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.

Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

Tugas pokok: Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Sumber Daya Air berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana disebutkan di atas, maka Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya air;
- b. Penyelenggaraan pembinaan pelaksanaan teknis Sumber Daya Air yang meliputi, pembinaan perekayasa, pembinaan konstruksi, pembinaan operasi dan pemeliharaan, serta pembinaan pemanfaatan sumber daya air;
- c. Penyelenggaraan fasilitasi dan sistem investasi perusahaan sumber daya air;
- d. Penyelenggaraan saran pertimbangan teknis pemanfaatan air dan sumber air serta pelaksanaan pelayanan umum pengelolaan sumber daya air;
- e. Penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;
- f. Penyelenggaraan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan sumber daya air;
- g. Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Barat, terdiri dari unsur-unsur :

1. KEPALA DINAS
2. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Dinas, menyelenggarakan perencanaan dan program, pengelolaan keuangan kepegawaian, dan Umum.

3. BIDANG REKAYASA TEKNIK

Bidang Rekayasa Teknik mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi rekayasa teknik.

4. BIDANG KONSTRUKSI

Bidang Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi konstruksi.

5. BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN

Bidang Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi Operasi dan Pemeliharaan.

6. BIDANG BINA MANFAAT

Bidang Bina Manfaat mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi bina manfaat.

7. UNIT PELAKSANA TEKNIK (UPT) DINAS

a. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (BPSDA WS)

Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pendayagunaan sumber daya air di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, BPSDA WS mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan operasional pelayanan di bidang sumber daya air yang meliputi pelaksanaan operasi dan pengelolaan data sumberdaya air, pemeliharaan serta perbaikan prasarana sumber daya air, pengendalian dan pengamanan pemanfaatan air dan sumber air.
2. Pelaksanaan pelayanan teknis administrative ketatausahaan yang meliputi pengelolaan umum, keuangan, perlengkapan dan kepegawaian. Pelaksanaan operasional pelayanan di bidang sumber daya air yang meliputi pelaksanaan operasi dan pengelolaan data sumber daya air, pemeliharaan serta perbaikan prasarana sumberdaya air, pengendalian dan pengamanan pemanfaatan air dan sumber air.
3. Pelaksanaan pelayanan teknis administrative ketatausahaan yang meliputi pengelolaan umum, keuangan, perlengkapan dan kepegawaian.

b. Balai Pusat Data dan Informasi SDA

Balai Pusat Data dan Informasi SDA mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang data dan informasi sumber daya air.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Balai Pusat Data dan Informasi SDA mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengolahan data system informasi sumber daya air.
2. Penyelenggaraan pengolahan data dan system informasi sumber daya air.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan adalah sebagai berikut :

A. Jaringan Irigasi

Kondisi jaringan irigasi juga belum memadai mengingat jaringan irigasi dalam kondisi rusak berat dan ringan masih sebesar 35%.

Luasnya daerah irigasi pedesaan di Provinsi Jawa Barat juga perlu menjadi pemikiran cara penanganannya. Peningkatan irigasi pedesaan menjadi irigasi teknis, termasuk juga pencetakan sawah baru dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan.

B. Kebutuhan Air Baku

Pemenuhan kebutuhan air baku untuk keperluan sehari-hari dan irigasi serta kebutuhan lainnya seperti perkotaan dan industri yang semakin meningkat.

C. Penanggulangan Bencana Banjir dan Kekeringan

Bencana banjir dan kekeringan juga masih terus terjadi antara lain akibat menurunnya kapasitas infrastruktur sumber daya air dan daya dukung lingkungan serta tersumbatnya muara sungai karena sedimentasi yang tinggi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2013-2018

Perencanaan Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang dalam hal ini Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat telah membuat Rencana Strategis Tahun 2013 – 2018, dimana strate/jik pada dasarnya adalah langkah-langkah konseptual dan konprehensif untuk memperlancar dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Buku Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Visi organisasi adalah cara pandang jauh kedepan kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar dapat Eksis, Antisipatif dan Inovatif, oleh karenanya suatu visi organisasi harus dapat menggambarkan keadaan masa depan yang diinginkan. Proses penyusunan Visi, Misi, dan Nilai-nilai dalam penyusunan ini dilakukan secara bersama seluruh anggota organisasi, dengan mengembangkan metoda *Shared Vission*.

Sedangkan Misi adalah merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan Instansi dan sasaran yang ingin dicapai. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya.

2.1.1. Visi

Visi merupakan gambaran masa depan ideal dan realistik yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi adalah jawaban atas pertanyaan "kita ingin menjadi apa", sehingga visi merupakan pemikiran apa yang menjadi pekerjaan kita dimasa yang akan datang. Visi adalah pernyataan tentang masa depan yang ditulis atau dibicarakan sekarang. Ini adalah suatu proses bagaimana mengelola realita saat ini dengan merentangkan pandangan ke masa depan.

Visi harus mampu memberikan makna yang dalam dan kuat tentang focus apa yang akan dikerjakan dalam medan persaingan sebagai upaya memperoleh keunggulan daya hidup organisasi. Visi Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat 2013-2018 yang ditetapkan adalah :
"INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI YANG ANDAL DAN BERKELANJUTAN"

Adapun sebagai penjelasan termaksud dari "*Visi*" tersebut adalah sebagai berikut :

- **Infrastruktur**: diartikan Prasarana bidang sumber daya air yang dikelola oleh Dinas PSDA

- **Sumber Daya Air dan Irigasi** : diartikan aktivitas Dinas PSDA yaitu mengelola sumberdaya air dan irigasi sebagai obyeknya.
- **Andal** : diartikan Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat dengan jumlah aparatur yang memadai memiliki kemampuan yang ada mampu melakukan pengelolaan sumberdaya air
- **Berkelanjutan** : diartikan pengelolaan sumberdaya air berkesinambungan dan terus menerus dari tahun ke tahun mulai dari RPJMD ke RPJP selanjutnya karena air sebagai kebutuhan hidup yang vital dan esensial.

2.1.2. Misi

Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai oleh organisasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan di masa datang. Pernyataan misi mencerminkan segala sesuatu penjelasan tentang bisnis/produk alat pelayanan yang ditawarkan untuk keperluan masyarakat. Pernyataan *misi* adalah pernyataan yang tegas tentang maksud tugas suatu organisasi yang membedakan maksud tugas/pekerjaan suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Pernyataan misi suatu organisasi mengarahkan/menunjukkan tentang rentang ruang lingkup dari cara beroperasi suatu organisasi.

Misi merupakan jawaban atas pertanyaan "apa tugas kita?" atau jawaban atas pernyataan "mengapa organisasi dibentuk /diadakan?" Pernyataan misi menunjukkan dengan jelas arti penting eksistensi organisasi, karena misi sebagai alasan dasar untuk berdirinya organisasi.

Banyak organisasi gagal karena pernyataan misi yang dirumuskan hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri dan mengabaikan kepentingan masyarakat/pelanggan dan stakeholders. Oleh karenanya pernyataan misi harus jelas menyatakan kepentingan masyarakat/pelanggan dan stakeholders.

Pernyataan misi yang jelas akan memberi arahan jangka panjang sehingga memberikan stabilitas manajemen dan kepemimpinan organisasi. Misi berubah apabila kehendak (*purpose*) organisasi berubah atau karena adanya validasi langkah/komponen manajemen strategik.

Rumusan Misi Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat adalah :

1. Mengembangkan kebijakan operasional Pengelolaan Sumber Daya Air.
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.
3. Meningkatkan upaya konservasi SDA, pendayagunaan SDA dan pengendalian daya rusak air.
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan irigasi.
5. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data sistem informasi Sumber Daya Air.

2.1.3. TUJUAN

Tujuan merupakan target bersifat kuantitatif atau kualitatif dari suatu organisasi yang pencapaiannya merupakan ukuran keberhasilan kinerja faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Tujuan bersifat jangka panjang, serasi dan mengklarifikasi visi, misi, dan nilai-nilai, diharapkan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.

Dengan mengindahkan visi dan misi organisasi dan berpedoman pada tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Barat menetapkan tujuan dari visi dan misinya, yaitu :

1. Memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan fungsi sumber air dan memperhatikan lingkungan sumber air
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola sumber daya air dan terciptanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air
3. Menjaga kelangsungan kondisi dan fungsi sumber air dan infrastruktur sumber daya air
4. Mewujudkan jaringan irigasi yang mampu mengalirkan debit air sesuai kebutuhan
5. Mewujudkan system pengelolaan data sumber daya air yang menjadi acuan pengelolaan sumber daya air

Tabel : 2.1. Matriks Hubungan antara Misi dan Tujuan

MISI	TUJUAN	INDIKATOR
Mengembangkan Kebijakan Operasional Pengelolaan Sumber Daya Air	Memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan fungsi sumber air dan memperhatikan lingkungan sumber air	1 Ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan
		2 Prosentase luas lahan sawah pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang terair
Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pengelola sumber daya air dan terciptanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air	3 Prosentase peningkatan Kinerja Pengelola Sumber Daya Air
Meningkatkan Upaya Konservasi, Pendayagunaan dan Pengendalian daya Rusak Air	Menjaga kelangsungan kondisi dan fungsi sumber air dan infrastruktur sumber daya air	4 Prosentase kondisi dan fungsi sumber air dan infrsatruktur sumber daya air
		5 Tingkat pengendalian daya rusak air yang dapat dilakukan
Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Pelayanan Irigasi	Mewujudkan jaringan irigasi yang mampu mengalirkan debit air sesuai kebutuhan	6 Intensitas Tanam yang dapat dilakukan dalam 1 tahun
Meningkatkan Ketersediaan Serta Kualitas Data dan Sistem Informasi Sumber Daya Air	Mewujudkan system pengelolaan data sumber daya air yang menjadi acuan pengelolaan sumber daya air	7 Jumlah instansi yang melakukan updating data sumber daya air secara berkala

2.1.4. SASARAN

Sasaran pada dasarnya adalah merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lebih pendek. Untuk mencapai tujuan di atas, maka disusun sasaran beserta indikatornya. Adapun Indikator Sasaran Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 antara lain :

- a. *Sasaran Strategis* : Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air
Indikator Kinerja : 1. Prosentase rekomendasi teknis pengajuan SIPPA yang diselesaikan tepat waktu
2. Prosentase intensitas tanam pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang terairi dalam 3 musim tanam
- b. *Sasaran Strategis* : Meningkatnya partisipasi sumber daya manusia dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan infrastruktur irigasi
Indikator Kinerja : 1. Partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan Sumber Daya Air
2. Prosentase pengelola Sumber Daya Air dan irigasi yang mengikuti diklat
- c. *Sasaran Strategis* : Meningkatnya kapasitas tampung sumber air dan berfungsinya infrastruktur sumber daya air yang terkena bencana alam
Indikator Kinerja : 1. Bertambahnya kapasitas tampung situ-situ di Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi
2. Prosentase infrastruktur Sumber Daya Air dan irigasi yang terkena bencana alam yang berhasil direhabilitasi
- d. *Sasaran Strategis* : Meningkatnya luas layanan jaringan irigasi
Indikator Kinerja : 1. Prosentase jaringan irigasi kewenangan provinsi dalam kondisi baik
- e. *Sasaran Strategis* : Meningkatnya sistem informasi sumber daya air yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat
Indikator Kinerja : 1. Akurasi data dalam Sistem Informasi Sumber Daya Air
2. Prosentase data sumber daya air yang dilayani

Tabel : 2.2. Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Strategis

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
1 Memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan fungsi sumber air dan memperhatikan lingkungan sumber air	Ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan	Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan Sumber Daya Air	Prosentase rekomendasi teknis pengajuan SIPPA yang diselesaikan tepat waktu
	Prosentase luas lahan sawah pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang terair		Prosentase intensitas tanam pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang terair dalam 3 musim tanam
2 Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola sumber daya air dan terciptanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air	Prosentase peningkatan Kinerja Pengelola Sumber Daya Air	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pengelola sumber daya air dan terciptanya peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan infrastruktur irigasi	Partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan Sumber Daya Air
			Prosentase pengelola Sumber Daya Air dan irigasi yang mengikuti diklat
3 Menjaga kelangsungan kondisi dan fungsi sumber air dan infrastruktur sumber daya air	Prosentase kondisi dan fungsi sumber air dan infrastruktur sumber daya air	Meningkatnya kapasitas tampung sumber air dan berfungsinya infrastruktur sumber daya air yang terkena bencana alam	Bertambahnya kapasitas tampung situ-situ di WS. Kewenangan Provinsi
	Tingkat pengendalian daya rusak air yang dapat dilakukan		Prosentase infrastruktur Sumber Daya Air dan irigasi yang terkena bencana alam yang berhasil direhabilitasi
4 Mewujudkan jaringan irigasi yang mampu mengalirkan debit air sesuai kebutuhan	Intensitas Tanam yang dapat dilakukan dalam 1 tahun	Meningkatnya luas layanan jaringan irigasi	Prosentase jaringan irigasi kewenangan provinsi dalam kondisi baik
5 Mewujudkan system pengelolaan data sumber daya air yang menjadi acuan pengelolaan sumber daya air	Jumlah instansi yang melakukan updating data sumber daya air secara berkala	Meningkatnya sistem informasi Sumber Daya Air yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat	Akurasi data dalam Sistem Informasi Sumber Daya Air
			Prosentase Data Sumber Daya Air yang dilayani

2.1.5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah suatu usaha untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan pemilihan strategi adalah proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling baik. Strategi juga memperhatikan bagaimana organisasi meningkatkan kinerjanya, dan bagaimana mencapai misinya. Strategi yang telah ditetapkan adalah :

- Meningkatkan konservasi sumber daya air secara berkelanjutan dengan cara memelihara daerah tangkapan air dan menjaga kelangsungan fungsi resapan air.
- Meningkatkan pengendalian daya rusak air dengan cara menyediakan sarana dan prasarana pengendali banjir yang baik

- c. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya air untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat dengan cara memenuhi kebutuhan air untuk irigasi, domestik, industri dan kebutuhan air lainnya
- d. Memperkuat kelembagaan di bidang pengelolaan sumber daya air dan meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur di bidang sumber daya air
- e. Meningkatkan pengelolaan sistem informasi di bidang sumber daya air sehingga terdapat database sumber daya air yang terintegrasi

Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air adalah agenda mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Untuk mewujudkan hal tersebut, bentuk dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah melalui pengelolaan sumber daya air yang terpadu untuk mewujudkan Ketahanan Air, Kedaulatan Pangan, dan Ketahanan Energi, yang akan diwujudkan melalui sasaran strategis: (1). Meningkatnya dukungan ketahanan air; (2). Meningkatnya dukungan untuk kedaulatan pangan dan energi, dengan sasaran program: (a). Meningkatnya layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku, (b). Meningkatnya kapasitas tampung sumber-sumber air, (c). Meningkatnya kinerja layanan irigasi, (d). Meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak air, (e). Meningkatnya upaya konservasi SDA, (f). Meningkatnya keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA, (g). Meningkatnya potensi energi dan sumber-sumber air. Hal tersebut akan diwujudkan melalui:

- a. Konservasi sumber daya air yang ditujukan agar terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber-sumber air alami dan buatan serta peningkatan kapasitas sumber-sumber air buatan, yang akan dicapai melalui strategi:
 - Pembangunan bendungan, dan pembangunan embung/situ/bangunan penampung air lainnya.
 - Rehabilitasi/peningkatan bendungan/waduk, situ, serta embung dan bangunan penampung air lainnya.
 - Restorasi sungai, revitalisasi danau/situ dan konservasi rawa.
 - Pembangunan pengendali sedimen (check dam).
 - Penataan dan pengamanan sumber air.
- b. Pendayagunaan sumber daya air yang ditujukan agar terpenuhinya kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari masyarakat serta untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif, yaitu:
 1. Untuk pemenuhan kebutuhan air bagi kehidupan sehari-hari, dicapai melalui strategi:
 - Pembangunan dan peningkatan fungsi dan kondisi sarana prasarana pengelolaan air baku.
 - Rehabilitasi fungsi dan kondisi sarana prasarana pengelolaan air baku.
 2. Untuk pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi produktif, dicapai melalui strategi:

- Peningkatan suplai irigasi waduk
 - Peningkatan layanan jaringan irigasi melalui pembangunan jaringan irigasi baru atau pembangunan jaringan irigasi tambak.
 - Pengembalian fungsi dan layanan jaringan irigasi melalui rehabilitasi jaringan irigasi
 - Terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi melalui Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi
- c. Pengendalian daya rusak air yang ditujukan untuk peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim, melalui penanganan kawasan yang terkena dampak banjir, sedimen/lahar gunung berapi, dan abrasi pantai, yang akan dicapai melalui strategi:
- Pembangunan dan peningkatan fungsi dan kondisi sarana dan prasarana pengamanan pantai.
 - Normalisasi sungai dan pembangunan/peningkatan tanggul sungai.
 - Peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air.
 - Penanganan darurat infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang terkena bencana alam.
- d. Kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan, termasuk peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi, akan difokuskan pada penataan kelembagaan, yang akan dicapai melalui strategi:
- Penyusunan dan penerapan pola dan rencana pengelolaan SDA terpadu yang berbasis wilayah sungai
 - Pengelolaan data dan informasi hidrologi wilayah sungai dan pengelolaan kualitas air pada sumber air
 - Penyusunan dan penerapan pola dan sistem investasi kerjasama pengelolaan SDA
 - Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan SDA
 - Penataan kelembagaan dan benchmarking antar lembaga PSDA
 - Pemberian bimbingan/bantuan teknis peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat dalam PSDA
 - Penerbitan rekomendasi teknis terkait perijinan pemanfaatan SDA

Adapun kebijakan yang mengikat terhadap pengelolaan sumber daya air antara lain :

1. Meningkatkan & mengembangkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik dan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.
2. Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air
3. Meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung perencanaan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan, serta mengembangkan dan menerapkan teknologi

informasi dalam manajemen pemerintahan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

4. Meningkatkan kondisi infrastruktur irigasi untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air.
5. Meningkatkan pelayanan OPD kepada masyarakat pengguna dan pemanfaat sumber daya air

Dalam rangka menjaga konsistensi dan keberlanjutan pembangunan secara keseluruhan, maka kebijaksanaan lebih difokuskan terhadap :

1. Pelestarian sumber daya air, pengendalian kualitas air, serta perlindungan sumber daya air.
2. Pemenuhan kebutuhan pokok penduduk akan air dan menunjang penyediaan kebutuhan pangan.
3. Pengamanan kawasan banjir dan bencana alam, serta pemulihan ekosistem.
4. Pembagian air antar sektor dan antar wilayah, pemberian nilai air, dan pengaturan air.
5. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat, Swasta dan Pemerintah
6. Peningkatan Keterbukaan dan Ketersediaan data dan informasi.

1.1.6. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan suatu proses bagi penentuan jenis dan jumlah sumber daya yang diperlukan suatu perencanaan rencana strategis. Program kerja merupakan penjabaran dari kebijakan sebagai arah dan strategi untuk pencapaian sasaran dan tujuan. Adapun program prioritas secara operasional pengelolaan sumber daya air dalam kurun 5 (lima) tahunan berpedoman pada pedoman operasional yang tertuang dalam Kebijakan Regional. Relevan dengan kebijaksanaan diatas, maka pelaksanaan Pengelolaan SDA Jawa Barat disusun sebagai berikut :

a. Program Prioritas :

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
2. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.
3. Program Pengendalian Banjir dan Kekeringan Serta Pengamanan Pantai
4. Program Pembinaan Jasa Konstruksi
5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

b. Program Penunjang :

1. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan Pembangunan Daerah
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan adalah merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan dengan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan program yang telah disusun. Kegiatan ini didalamnya mencakup kegiatan utama dan kegiatan penunjang. Kegiatan yang telah ditetapkan adalah tahun 2016 adalah:

a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

- Pengelolaan Jaringan Irigasi di 6 Wilayah Sungai;
- Pembebasan Lahan dan Pembangunan D.I. Caringin di Kab. Sukabumi;
- Rehabilitasi jaringan Irigasi (DAK) di 6 Wilayah Sungai;
- Perencanaan Detail Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Jawa Barat;
- Peningkatan Kapasitas Kegiatan Sumber Daya Air di Jawa Barat;
- Pemantauan dan Pengembangan Potensi O&P Jaringan Irigasi di Jawa Barat;
- Dukungan Pembangunan Bendung Rengrang di Kab. Sumedang;
- Pengelolaan Jaringan Irigasi Terpadu Lintas Kewenangan Provinsi;
- Dukungan DAK Rehabilitasi Jaringan Irigasi;

b. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumberdaya Air Lainnya

- Perencanaan Umum Sumber Daya Air Bidang Sungai, Situ, dan Sumber Air Lainnya di Jawa Barat;
- Perencanaan Detail Situ, Waduk dan Sungai di Jawa Barat;
- Dukungan Pembangunan Waduk Strategis di Jawa Barat (Waduk Jatigede di Kab. Sumedang, Waduk Cileuweung di Kab. Kuningan, Waduk Sadawarna di Kab. Subang; Waduk Leuwikeris di Kab. Ciamis);
- Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Air Permukaan dan Tanah Negara;
- Pengaturan Sempadan Sumber Air di Jawa Barat;
- Penerbitan Saran Teknis Air Permukaan dan Pemanfaatan Pemakaian Tanah Negara di Jawa Barat;
- Pemberdayaan Lembaga Koordinasi dan Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi;
- Dewan SDA Provinsi Jawa Barat;
- Pengelolaan Situ-situ di 6 Wilayah Sungai;
- Pengelolaan dan Analisis Data Hidrologi Jawa Barat;
- Manajemen DAS di 6 Wilayah Sungai;
- Perbaikan dan Pemeliharaan Sungai di 4 Wilayah Sungai;

- WISMP-2 dan Pendamping Hibah APBD pada Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat dan Balai PSDA WS. Cisadea-Cibareno;
- Survey Investigasi Rekayasa Teknik Sumber Daya Air;
- Pengelolaan Terintegrasi DAS Citarum, DAS Ciliwung, dan DAS Cimanuk;
- Pembangunan dan Pengamanan Mata Air DAS Citarum;
- CLTH PPK AMDAL Pembangunan Bendungan Ciletuh.

c. Program Pengendalian Banjir dan Kekeringan serta Pengamanan Pantai

- Dukungan Pengendalian Banjir dan Kekeringan di 6 Wilayah Sungai;
- Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Kekeringan di 6 Wilayah Sungai;
- Penanganan Banjir Cilancang di Kota Bandung, Kota Depok, dan Kota Bekasi.

d. Program Pembinaan Jasa Konstruksi

- Pembinaan Pelaksanaan dan Monitoring Kegiatan Konstruksi di Jawa Barat
- Supervisi Konstruksi Bidang Sumber Daya Air

e. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

- Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air di Jawa Barat
- Sosialisasi Pelaksanaan Pembangunan
- Pengelolaan Sistem Data Base dan Informasi Sumber Daya Air di Jawa Barat

f. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

h. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

i. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur

j. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Internal Dinas PSDA Provinsi

k. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- Penyusunan Dokumen Sinergitas Perencanaan Sumber Daya Air
- Verifikasi Bantuan Keuangan Kabupaten/kota di Jawa Barat

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Pemenpan No. 53 Tahun 2014 disebutkan bahwa Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Gubernur sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Gubernur Jawa Barat sebagai pemberi amanah dan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Rencana kinerja merupakan proses penyusunan perencanaan sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, oleh karena itulah di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penetapan Perjanjian Kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan gambaran bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun 2016 ini. Di dalam Perjanjian kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, adapun sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen renstra yang selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun 2016 ini beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah : Sebagai wujud nyata komitmen antara Gubernur dan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

1. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
3. Sebagai dasar bagi Gubernur untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat;
4. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja tahun 2016 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahun 2016

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1 Memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan fungsi sumber air dan memperhatikan lingkungan sumber air	1 Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan Sumber Daya Air	1 Prosentase rekomendasi teknis pengajuan SIPPA yang diselesaikan tepat waktu	100%
		2 Prosentase intensitas tanam pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang terairi dalam 3 musim tanam	220%
2 Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pengelola sumber daya air dan terciptanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air	2 Meningkatnya partisipasi sumber daya manusia dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan infrastruktur irigasi	1 Partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan Sumber Daya Air	4 Tahapan
		2 Prosentase pengelola Sumber Daya Air dan irigasi yang mengikuti diklat	2%
3 Menjaga kelangsungan kondisi dan fungsi sumber air dan infrastruktur sumber daya air	3 Meningkatnya kapasitas tampung sumber air dan berfungsi infrastruktur sumber daya air yang terkena bencana alam	1 Bertambahnya kapasitas tampung situ-situ di WS. Kewenangan Provinsi	150.000 m3
		2 Prosentase infrastruktur Sumber Daya Air dan irigasi yang terkena bencana alam yang berhasil direhabilitasi	100%
4 Mewujudkan jaringan irigasi yang mampu mengalirkan debit air sesuai kebutuhan	4 Meningkatnya luas layanan jaringan irigasi	1 Prosentase jaringan irigasi kewenangan provinsi dalam kondisi baik	72,05%
5 Mewujudkan system pengelolaan data sumber daya air yang menjadi acuan pengelolaan sumber daya air	5 Meningkatnya sistem Informasi Sumber Daya Air yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat	1 Akurasi data dalam Sistem Informasi Sumber Daya Air	62%
		2 Prosentase Data Sumber Daya Air yang dilayani	100%

Target Capaian yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Gubernur dengan Kepala Dinas tersebut tersebut tentunya didukung dengan penganggaran sebagai berikut :

Tabel 2.4. Belanja Langsung APBD Dinas PSDA Tahun 2016

		Belanja Langsung (Rp)
	BELANJA LANGSUNG	294.160.463.728
1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	162.254.370.560
2	Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumberdaya Air Lainnya	79.446.683.060
3	Program Pengendalian Banjir dan Kekeringan serta Pengamanan Pantai	2.696.230.440
4	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	3.220.616.290
5	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi,	2.124.100.640
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.397.783.840
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	23.999.602.950
8	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.857.752.700
9	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.449.163.248
10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	150.000.000
11	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	564.160.000

Sedangkan penganggaran untuk setiap indikator yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Gubernur dengan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5. Penganggaran Kinerja Tahun 2016

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	PAGU
1	Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan Sumber Daya Air	Prosentase rekomendasi teknis pengajuan SIPPA yang diselesaikan tepat waktu	100%	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya	6.383.235.800
		Prosentase intensitas tanam pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang terairi dalam 3 musim tanam	220%	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	405.141.240
2	Meningkatnya partisipasi sumber daya manusia dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan infrastruktur irigasi	Partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan Sumber Daya Air	4 Tahapan	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya	10.139.590.000
		Prosentase pengelola Sumber Daya Air dan irigasi yang mengikuti diklat	2%	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	2.533.288.840
				Program Pembinaan Jasa Konstruksi	2.933.116.290
				Program Pembinaan Jasa Konstruksi	287.500.000
				Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	759.465.040
3	Meningkatnya kapasitas tampung sumber air dan berfungsi infrastruktur sumber daya air yang terkena bencana alam	Bertambahnya kapasitas tampung situ-situ di WS. Kewenangan Provinsi	150.000 m3	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya	16.523.280.860
		Prosentase infrastruktur Sumber Daya Air dan irigasi yang terkena bencana alam yang berhasil direhabilitasi	100%	Program Pengendalian Banjir dan Kekeringan serta Pengamanan Pantai	2.696.230.440
4	Meningkatnya luas layanan jaringan irigasi	Prosentase jaringan irigasi kewenangan provinsi dalam kondisi baik	72,05%	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	135.210.175.440
5	Meningkatnya sistem informasi Sumber Daya Air yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat	Akurasi data dalam Sistem Informasi Sumber Daya Air	62%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	256.270.000
		Prosentase Data Sumber Daya Air yang dilayani	100%	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya	482.494.240
				Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	1.867.830.640

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1. CAPAIAN KINERJA

Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat berkontribusi dalam mendukung Program Gubernur dalam hal Ketahanan Pangan. Dalam hal ini Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Jawa Barat yang tidak lain merupakan Indikator Kinerja Utama Gubernur adalah Tingkat kondisi baik jaringan irigasi di Daerah Irigasi kewenangan Provinsi, dimana target tahun 2016 adalah 72,05% dan Capaian Kinerja adalah 72,06%.

Adapun pencapaian kinerja Dinas PSDA terhadap Renstra maupun Indikator Utama yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Tahun 2016

1	Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan Sumber Daya Air	Prosentase rekomendasi teknis pengajuan SIPPA yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100
		Prosentase intensitas tanam pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang terairi dalam 3 musim tanam	220%	220%	100
2	Meningkatnya partisipasi sumber daya manusia dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan infrastruktur irigasi	Partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan Sumber Daya Air	4 Tahapan	4 Tahapan	100
		Prosentase pengelola Sumber Daya Air dan irigasi yang mengikuti diklat	2%	1,77%	88,50
3	Meningkatnya kapasitas tampung sumber air dan berfungsinya infrastruktur sumber daya air yang terkena bencana alam	Bertambahnya kapasitas tampung situ-situ di WS. Kewenangan Provinsi	150.000 m3	520.000 m3	354,93
		Prosentase infrastruktur Sumber Daya Air dan irigasi yang terkena bencana alam yang berhasil direhabilitasi	100%	100%	100
4	Meningkatnya luas layanan jaringan irigasi	Prosentase jaringan irigasi kewenangan provinsi dalam kondisi baik	72,05%	72,06%	100,01
5	Meningkatnya sistem informasi Sumber Daya Air yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat	Akurasi data dalam Sistem Informasi Sumber Daya Air	62%	60,73%	97,95
		Prosentase Data Sumber Daya Air yang dilayani	100%	100%	100

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja

1	Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan Sumber Daya Air	Prosentase rekomendasi teknis pengajuan SIPPA yang diselesaikan tepat waktu	100%	100	100
		Prosentase intensitas tanam pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang terair dalam 3 musim tanam	220%	100	100
2	Meningkatnya partisipasi sumber daya manusia dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan infrastruktur irigasi	Partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan Sumber Daya Air	4 Tahapan	100	100
		Prosentase pengelola Sumber Daya Air dan irigasi yang mengikuti diklat	1,77%	75,50	88,50
3	Meningkatnya kapasitas tampung sumber air dan berfungsi infrastruktur sumber daya air yang terkena bencana alam	Bertambahnya kapasitas tampung situ-situ di WS. Kewenangan Provinsi	520.000 m3	101,60	354,93
		Prosentase infrastruktur Sumber Daya Air dan irigasi yang terkena bencana alam yang berhasil direhabilitasi	100%	100	100
4	Meningkatnya luas layanan jaringan irigasi	Prosentase jaringan irigasi kewenangan provinsi dalam kondisi baik	69,65%	96,74	100,01
5	Meningkatnya sistem informasi Sumber Daya Air yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat	Akurasi data dalam Sistem Informasi Sumber Daya Air	58,33%	97,22	97,95
		Prosentase Data Sumber Daya Air yang dilayani	100%	100	100

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

1	Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan Sumber Daya Air	Prosentase rekomendasi teknis pengajuan SIPPA yang diselesaikan tepat waktu	100%/Tahun	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya partisipasi sumber daya manusia dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan infrastruktur irigasi	Prosentase intensitas tanam pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang terairi dalam 3 musim tanam	220%/Tahun	220%	220%	220%	100%
		Partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan Sumber Daya Air	4 Tahap/Tahun	4 Tahapan	4 Tahapan	4 Tahapan	100%
3	Meningkatnya kapasitas tampung sumber air dan berfungsi infrastruktur sumber daya air yang terkena bencana alam	Prosentase pengelola Sumber Daya Air dan irigasi yang mengikuti diklat	10%	3,84%	1,77%	5,61%	56,10%
		Bertambahnya kapasitas tampung situ-situ di WS Kewenangan Provinsi	520.000 m3	201.800 m3	520.000 m3	721.800 m3	138,81%
4	Meningkatnya luas layanan jaringan irigasi	Prosentase infrastruktur Sumber Daya Air dan irigasi yang terkena bencana alam yang berhasil direhabilitasi	100%/Tahun	100%	100%	100%	100%
		Prosentase jaringan irigasi kewenangan provinsi dalam kondisi baik	82%	69,65%	72,06%	72,06%	87,88%
5	Meningkatnya sistem informasi Sumber Daya Air yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat	Akurasi data dalam Sistem Informasi Sumber Daya Air	67%	59,33%	60,73%	60,73%	90,64%
		Prosentase Data Sumber Daya Air yang dilayani	100%/Tahun	100%	100%	100%	100%

3.1.2. ANALIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN DAN SOLUSI

Adapun Keberhasilan yang telah dicapai oleh Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Pada sasaran strategis meningkatnya luas layanan jaringan irigasi dengan indikator Prosentase jaringan irigasi kewenangan provinsi dalam kondisi baik dengan melakukan O&P Jaringan irigasi pada 91 Daerah Irigasi (DI) dan Rehabilitasi jaringan irigasi pada 49 DI, dalam rangka memperbaiki dan mempertahankan kondisi prasarana irigasi yang rusak, dimana pada tahun 2015 kondisi baik jaringan irigasi 69,65%, rusak sedang 12,5% dan rusak berat 17,85% sedangkan pada tahun 2016 kondisi baik jaringan irigasi meningkat menjadi sebesar 72,06%, rusak sedang 10,85% dan rusak berat 17,09%.
- b. Melakukan perbaikan infrastruktur sumber daya air melalui pembuatan perkuatan tebing, perkuatan tanggul, normalisasi, pembuatan TPT, dan ground sill terhadap 19 sungai (Sungai Citiis Kab. Sukabumi; Sungai Cicatih Kab. Sukabumi; Sungai Cikupa Kab. Sukabumi; Sungai Cipelang Lembur Situ Kota Sukabumi; Sungai Cibalapulang Kab. Sukabumi; Sungai Cikasungka Kab. Bandung; Sungai Cibiru Kidul Kab. Bandung; Sungai Cikorobokan Kab. Sumedang; Sungai Cibalagung Kab. Cianjur; Sungai Cibeureum Kab. Bandung; Sungai Cibodas Kab. Bandung; Sungai Cijalupang Kab. Bandung; Sungai Cilonggan Kab. Tasikmalaya; Sungai Cijalu Kab. Pangandaran; Sungai Cikaengan Kab. Garut; Sungai Cisaruni Kab. Tasikmalaya; Sungai Cibanjuran Kab. Tasikmalaya; Sungai Ciberes Kab. Cirebon; Sungai Cibolerang) sehingga masyarakat sekitar terlindungi dari ancaman banjir dan longsor.
- c. Permasalahan klasik Sumber Daya Air di Jawa Barat saat ini adalah : *air terlalu banyak, air terlalu sedikit, dan air selalu kotor*. Akibat dari perubahan iklim menyebabkan banjir yang selalu menghantui masyarakat. Berdasarkan hasil pemantauan daerah rawan banjir di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016, daerah rawan banjir terdapat hampir di semua Kabupaten/Kota di Jawa Barat mengalami banjir. Oleh Karena itu Dinas PSDA mempersiapkan bahan banjir untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan darurat infrastruktur SDA dan Irigasi, sehingga begitu ada kerusakan akibat bencana alam tersebut segera dapat ditanggulangi. Hal tersebut berkontribusi pada pencapaian indikator Prosentase Infrastruktur Sumber Daya Air dan irigasi yang terkena bencana alam yang berhasil direhabilitasi.

Dari beberapa keberhasilan di atas tidak menutup kemungkinan juga adanya permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan TA.2016, namun dalam pelaksanaannya tidak terlalu signifikan yang berpengaruh terhadap prestasi yang telah dicapai antara lain :

- a. Pada Indikator prosentase pengelola Sumber Daya Air dan irigasi yang mengikuti diklat terdapat kendala terlambatnya informasi atau keterangan tentang penyelenggaraan diklat atau pelatihan yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan aparatur Dinas

PSDA khususnya dalam pengelolaan Sumber Daya Air serta terbatasnya aparatur yang dapat diikutsertakan dalam penyelenggaraan diklat.

- b. Pada Indikator akurasi data dalam Sistem Informasi Sumber Daya Air, belum optimalnya pencapaian sasaran dikarenakan belum lengkapnya informasi yang berkenaan dengan pembangunan ataupun pengelolaan sumber daya air yang tertuang dalam Sistem Informasi Sumber Daya Air serta terdapat beberapa data yang belum terupdate.
- c. Kondisi Bencana Alam yang tidak dapat diprediksi menjadi salah satu penyebab menurunnya kondisi jaringan irigasi bahkan terhadap jaringan irigasi yang baru dilakukan pemeliharaan maupun rehabilitasi sekalipun sehingga menyebabkan kondisi jaringan irigasi tidak optimal dan kontribusi terhadap prosentase kenaikan kondisi jaringan irigasi baik tidak terlalu signifikan.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang maka dilakukan beberapa upaya pemecahan /solusi antara lain :

1. Untuk meningkatkan kondisi baik jaringan irigasi perlu meningkatkan O&P dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi agar fungsi jaringan irigasi lebih optimal dalam rangka menunjang Program Ketahanan Pangan Nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani.
2. Untuk mengurangi daerah rawan banjir telah dilakukan beberapa upaya dengan meningkatkan potensi kapasitas tampung situ-situ, waduk secara optimal dan membuat waduk-waduk kecil atau longstorage sebagai penampung air, melakukan perbaikan dan pemeliharaan sungai, melakukan O&P dan rehabilitasi situ, pengendalian pemanfaatan sumber air dan pengaturan sempadan sumber air. Upaya-upaya tersebut belum bisa maksimal hasilnya dirasakan oleh masyarakat kalau tidak dilakukan penanganan DAS secara terintegrasi yaitu untuk menjaga kelangsungan daya dukung, daya tampung dan fungsi sumber daya air. Pengelolaan DAS terintegrasi merupakan upaya pengelolaan sumber daya menyangkut berbagai pihak (multi pihak) yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara partisipatif, masyarakat sebagai sumber utama sedangkan pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan. Untuk masa mendatang harus ditingkatkan lintas koordinasi/ kerjasama dengan berbagai pihak untuk mensinergiskan program kegiatan pembangunan antara lain, dengan :
 - Instansi yang berperan dalam penatagunaan hutan, pengelolaan kawasan konservasi dan rehabilitasi hutan
 - Instansi yang berperan dalam pembinaan masyarakat dalam pemanfaatan lahan
 - Instansi yang berperan dalam pengaturan air tanah, rehabilitasi/ reklamasi kawasan tambang.
 - Instansi yang berperan dalam pengendalian kualitas lingkungan.

- Masyarakat yang menerima/ menikmati hasil pembangunan.
3. Pengelolaan DAS yang baik akan berdampak meningkatnya daya dukung lingkungan, mengurangi banjir, tanah longsor dan kekeringan. Sehingga akan tercapai peningkatan stock pangan dan mengurangi kemiskinan serta meningkatkan keamanan.
 4. Berperan aktif dalam mengidentifikasi kembali SDM yang ada di Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat dan juga Keperluan Bidang maupun Balai terhadap kemampuan dan kompetensi aparatur dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air khususnya di Jawa Barat. Sehingga dapat dianalisis kompetensi / keterampilan yang diperlukan dan peluang pelatihan / diklat yang diselenggarakan oleh Instansi / Lembaga / Yayasan.
 5. Memaksimalkan pengelolaan sistem informasi SDA dan mencoba melakukan integrasi secara langsung dengan Balai/Bidang yang berada di Lingkungan Dinas PSDA provinsi Jawa Barat sehingga data-data yang ada dalam Sistem informasi tersebut dapat lebih akurat dan lebih terbuka untuk masyarakat yang membutuhkan data di bidang SDA.

3.1.3. ANALIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Tabel 3.4
Anggaran Belanja APBD Tahun 2016

NO	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PROGRES CAPAIAN (%)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	45.955.396.559	42.288.921.240	92,02
	Belanja Pegawai	45.955.396.559	42.288.921.240	92,02
II	BELANJA LANGSUNG	294.160.463.728	255.243.078.813	86,77
	Belanja Pegawai	18.996.298.100	18.542.811.100	97,61
	Belanja Barang dan Jasa	101.070.643.528	93.013.848.568	92,03
	Belanja Modal	174.093.522.100	143.686.419.145	82,53
	JUMLAH	340.115.860.287	297.532.000.053	87,48

Tabel 3.5
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGA- RAN
1	Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan Sumber Daya Air	Prosentase rekomendasi teknis pengajuan SIPPA yang diselesaikan tepat waktu	6.383.235.800	2,17
		Prosentase intensitas tanam pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang terairi dalam 3 musim tanam	405.141.240	0,14
2	Meningkatnya partisipasi sumber daya manusia dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan infrastruktur irigasi	Partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan Sumber Daya Air	15.605.995.130	5,31
		Prosentase pengelola Sumber Daya Air dan irigasi yang mengikuti diklat	1.046.965.040	0,36
3	Meningkatnya kapasitas tampung sumber air dan berfungsi infrastruktur sumber daya air yang terkena bencana alam	Bertambahnya kapasitas tampung situ-situ di WS. Kewenangan Provinsi	16.523.280.860	5,62
		Prosentase infrastruktur Sumber Daya Air dan irigasi yang terkena bencana alam yang berhasil direhabilitasi	2.696.230.440	0,92
4	Meningkatnya luas layanan jaringan irigasi	Prosentase jaringan irigasi kewenangan provinsi dalam kondisi baik	135.210.175.440	45,96
5	Meningkatnya sistem informasi Sumber Daya Air yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat	Akurasi data dalam Sistem Informasi Sumber Daya Air	738.764.240	0,25
		Prosentase Data Sumber Daya Air yang dilayani	1.867.830.640	0,63

Tabel 3.6
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan Sumber Daya Air	Prosentase rekomendasi teknis pengajuan SIPPA yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100	6.383.235.800	5969111613	93,51
	Prosentase intensitas tanam pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang terairi dalam 3 musim tanam	220%	220%	100	405.141.240	395.121.720	97,53
Meningkatnya partisipasi sumber daya manusia dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan infrastruktur irigasi	Partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan Sumber Daya Air	4 Tahapan	4 Tahapan	100	15.605.995.130	14162846229	90,75
	Prosentase pengelola Sumber Daya Air dan irigasi yang mengikuti diklat	2%	1,77%	88,50	1.046.965.040	958.682.611	91,57
Meningkatnya kapasitas tampung sumber air dan fungsinya infrastruktur sumber daya air yang terkena bencana alam	Bertambahnya kapasitas tampung situ-situ di WS. Kewenangan Provinsi	150.000 m ³	520.000 m ³	354,93	16.523.280.860	16.436.156.485	99,47
	Prosentase infrastruktur Sumber Daya Air dan irigasi yang terkena bencana alam yang berhasil direhabilitasi	100%	100%	100	2.696.230.440	2.610.814.743	96,83
Meningkatnya luas layanan jaringan irigasi	Prosentase jaringan irigasi kewenangan provinsi dalam kondisi baik	72,05%	72,06%	100,01	135.210.175.440	132958783417	98,33
Meningkatnya sistem informasi Sumber Daya Air yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat	Akurasi data dalam Sistem Informasi Sumber Daya Air	62%	60,73%	97,95	738.764.240	685493760	92,79
	Prosentase Data Sumber Daya Air yang dilayani	100%	100%	100	1.867.830.640	1.622.820.514	86,88

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan Sumber Daya Air	Prosentase rekomendasi teknis pengajuan SIPPA yang diselesaikan tepat waktu	100	93,51	6,49
		Prosentase intensitas tanam pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang terairi dalam 3 musim tanam	100	97,53	2,47
2	Meningkatnya partisipasi sumber daya manusia dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan infrastruktur irigasi	Partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan Sumber Daya Air	100	90,75	9,25
		Prosentase pengelola Sumber Daya Air dan irigasi yang mengikuti diklat	88,50	91,57	-3,07
3	Meningkatnya kapasitas tampung sumber air dan berfungsi infrastruktur sumber daya air yang terkena bencana alam	Bertambahnya kapasitas tampung situ-situ di WS. Kewenangan Provinsi	354,93	99,47	255,46
		Prosentase infrastruktur Sumber Daya Air dan irigasi yang terkena bencana alam yang berhasil direhabilitasi	100	96,83	3,17
4	Meningkatnya luas layanan jaringan irigasi	Prosentase jaringan irigasi kewenangan provinsi dalam kondisi baik	100,01	98,33	1,68
5	Meningkatnya sistem informasi Sumber Daya Air yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat	Akurasi data dalam Sistem Informasi Sumber Daya Air	97,95	92,79	5,16
		Prosentase Data Sumber Daya Air yang dilayani	100	86,88	13,12

3.1.4. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN / KEGAGALAN

Beberapa keberhasilan yang dicapai oleh Dinas PSDA tidak lain merupakan keberhasilan Program / Kegiatan, antara lain :

1. Pengelolaan Jaringan Irigasi pada 6 Wilayah Sungai yang terdiri dari O&P Jaringan Irigasi serta Rehabilitasi Jaringan Irigasi baik dari dana APBD maupun dana DAK sehingga dapat meningkatkan kondisi baik jaringan irigasi kewenangan provinsi dari 69,65% menjadi 72,06%. Dengan kondisi baik jaringan irigasi tentunya juga akan meningkatkan intensitas tanam yang baik bagi para petani.
2. Pengelolaan Situ-Situ pada 6 Wilayah Sungai yang terdiri dari pemeliharaan situ dan rehabilitasi atau penataan beberapa situ di Jawa Barat yang berkontribusi dalam meningkatkan daya tampung Situ-situ di Jawa Barat sehingga dapat meningkatkan pula ketersediaan air Baku di Jawa Barat
3. Penanggulangan Bencana Banjir dan Kekeringan yang juga difasilitasi dengan Dukungan Pengendalian Banjir dan Kekeringan di 6 Wilayah Sungai sehingga infrastruktur SDA dan Irigasi yang terkena bencana banjir dapat segera ditanggulangi
4. Pengendalian Pemanfaatan Air Permukaan dan Tanah Negara yang terdiri dari penerbitan saran teknik, pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan air permukaan dan tanah negara juga dengan adanya pergub sempadan sumber air dapat mengendalikan atau meminimalisir penggunaan air permukaan dan tanah negara yang tidak sesuai. Selain itu dengan pengelolaan DAS yang baik di 6 wilayah sungai dapat juga mengendalikan penggunaan air permukaan tersebut.
5. Perbaikan dan pemeliharaan sungai-sungai di 4 wilayah sungai telah merupakan upaya untuk meningkatkan Prasarana Pengamanan dan Pendayagunaan Sungai, Pengendalian Banjir dan Penanggulangan Daya Rusak Air untuk melindungi prasarana wilayah, permukiman dan lingkungan dalam rangka meningkatkan daya tampung dan daya dukung lingkungan.

Selain keberhasilan yang telah dicapai oleh Dinas PSDA Provinsi Jawa barat juga terdapat beberapa kegagalan yaitu pada kegiatan Kegiatan Pembebasan Lahan dan Pembangunan DI. Caringin di Kab. Sukabumi, dimana beberapa permasalahan timbul dalam upaya pembebasan lahan untuk pembangunan DI. Caringin, antara lain :

- 1) Pengukuran dan penggambaran peta rincian pengadaan lahan untuk pembangunan Daerah Irigasi Caringin ada perubahan peraturan tentang Biaya Operasional dan Pendukung untuk Satgas, yang semula melalui PNBK menjadi usulan RAB dari BPN. Perubahan ini mengakibatkan adanya penundaan dimulainya pengukuran dan survei yang akan dilaksanakan oleh satgas, karena pembiayaan di DPA perlu direvisi dalam Perubahan 2016;

- 2) Pengukuran dan Penggambaran Peta Rincikan Bidang/Persil Desa untuk Desa Gunung Karamat, Pasirbaru dan Caringin, diperoleh sesuai trace perencanaan seluas 71 Ha. Perubahan kebutuhan tanah dibutuhkan dengan melihat kondisi medan yang cukup berat, khususnya kebutuhan untuk keamanan konstruksi irigasi (kestabilan lereng);
- 3) Pengukuran dan penggambaran peta rincian bidang/persil Desa oleh Tim Satgas A/B dimulai 25 November 2016 sampai dengan 5 Desember 2016 data yang belum lengkap untuk dimasukkan dalam aplikasi BPN tinggal beberapa bidang yang belum lengkap (data tegakan) diantaranya Desa Pasir Baru 14 bidang, Desa Caringin 7 bidang Desa Gunung Karamat 3 bidang, sehingga belum masuk ke aplikasi;

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat telah menempuh beberapa upaya pemecahan/solusi yaitu dengan :

- 1) Untuk pengadaan lahan dengan luas 41 Ha proses pengukuran dan penggambaran Peta Rincikan Bidang/Persil Desa dilanjutkan sesuai ketentuan yang ada;
- 2) Untuk tambahan Pengadaan Lahan sisanya (30Ha) perlu diterbitkan Penlok baru 30 Ha atau revisi Penlok dari 41 Ha menjadi 71 Ha;
- 3) Pengadaan lahan sesuai Penlok (41Ha) menunggu data tegakan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sukabumi dan segera akan didaftarkan pada Aplikasi tanggal 3 Januari 2017;
- 4) Pengumuman selama 14 hari dilaksanakan setelah selesai pendaftaran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, untuk penilaian harga dari pihak ketiga dipersiapkan dari awal, sehingga waktu pengumuman selesai pelaksanaan penilaian harga bisa dilaksanakan;
- 5) Proses Musyawarah setelah pengumuman dan penilai harga bisa dipercepat sepanjang masyarakat pemilik lahan sudah sepakat (dibuat Berita Acara);
- 6) Bersamaan dengan proses pengadaan lahan 41 Ha, untuk pengadaan lahan sisanya 30 Ha diproses dimulai dari penerbitan Penlok dari bulan Januari 2017 dan pelaksanaan pembayaran kalau semua proses dan persyaratan dipenuhi pembayaran pengadaan lahan untuk 30 Ha bisa dilaksanakan bulan Juni 2017.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat tahun 2016 adalah :

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Tahun 2016

	BELANJA LANGSUNG	294.160.463.728	255.243.078.813	86,77
1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	162.254.370.560	132.085.209.311	81,41
2	Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumberdaya Air Lainnya	79.446.683.060	75.628.563.843	95,19
3	Program Pengendalian Banjir dan Kekeringan serta Pengamanan Pantai	2.696.230.440	2.610.814.743	96,83
4	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	3.220.616.290	2.754.013.210	85,51
5	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	2.124.100.640	1.872.577.514	88,16
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.397.783.840	8.232.028.058	87,60
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	23.999.602.950	22.403.305.750	93,35
8	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.857.752.700	7.078.529.064	90,08
9	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.449.163.248	1.926.195.550	78,65
10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	150.000.000	125.577.658	83,72
11	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	564.160.000	526.264.112	93,28

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Per Indikator Tahun 2016

No	Indikator	Keterangan	Tahapan	Program	Anggaran	Realisasi
1	Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan Sumber Daya Air	Prosentase rekomendasi teknis pengajuan SIPPA yang diselesaikan tepat waktu	100%	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya	6.383.235.800	5.969.111.813
		Prosentase intensitas tanam pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang teralir dalam 3 musim tanam	220%	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	405.141.240	395.121.720
2	Meningkatnya partisipasi sumber daya manusia dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan infrastruktur irigasi	Partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan Sumber Daya Air	4 Tahapan	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya	10.139.590.000	2.513.956.532
				Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	2.533.288.840	9.142.396.087
				Program Pembinaan Jasa Konstruksi	2.933.116.290	2.506.493.610
			2%	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	287.500.000	247.519.600
		Prosentase pengelola Sumber Daya Air dan irigasi yang mengikuti diklat		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	759.465.040	711.163.011
3	Meningkatnya kapasitas tampung sumber air dan berfungsinya infrastruktur sumber daya air yang terkena bencana alam	Bertambahnya kapasitas tampung situ-situ di WS. Kewenangan Provinsi	150.000 m3	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya	16.523.280.860	16.436.156.485
		Prosentase infrastruktur Sumber Daya Air dan irigasi yang terkena bencana alam yang berhasil direhabilitasi	100%	Program Pengendalian Banjir dan Kekenangan serta Pengamanan Pantai	2.696.230.440	2.610.814.743
4	Meningkatnya luas layanan jaringan irigasi	Prosentase jaringan irigasi kewenangan provinsi dalam kondisi baik	72,05%	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	135.210.175.440	132.958.783.417
5	Meningkatnya sistem informasi Sumber Daya Air yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat	Akurasi data dalam Sistem Informasi Sumber Daya Air	62%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	256.270.000	249.757.000
				Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya	482.494.240	435.736.760
		Prosentase Data Sumber Daya Air yang dilayani	100%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	1.867.830.640	315.418.960

3.3. PRESTASI TAHUN 2016

a. Nama Penghargaan :

Pemenang II (Cecep Sofyan, Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat)
Lomba Desain Seragam OP Prasarana Sumber Daya Air Tingkat nasional Tahun 2016

Yang Menyerahkan :

Plt. Direktur Bina O&P Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Lolly Martina Martief

Tanggal Penyerahan :

Desember 2016

b. Nama Penghargaan :

Pemenang Harapan II (Narsan, ST., Kepala Sub Unit Pelayanan Kuningan, DI. Cipager, Kab. Cirebon)

Lomba Pemilihan Petugas Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa Teladan Tingkat Nasional untuk Unit Pelaksanan Teknis Daerah/Pengamat Tingkat Nasional Tahun 2016)

Yang Menyerahkan :

Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat

M. Basuki Hadimuljono

Tanggal Penyerahan :

November 2016

c. Nama Penghargaan :

Pemenang Harapan I (Aros Saprodin, Juru Pengairan Cimarunjung, DI. Cimarunjung, Kab. Sukabumi)

Lomba Pemilihan Petugas Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa Teladan Tingkat Nasional untuk Juru/Mantri PengairanTingkat Nasional Tahun 2016)

Yang Menyerahkan :

Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat

M. Basuki Hadimuljono

Tanggal Penyerahan :

November 2016

d. Nama Penghargaan :

Pemenang III (Dinas PU dan Pengairan Kab. Cianjur)

Lomba Cipta Lagu/Mars OP Tingkat Nasional Tahun 2016)

Yang Menyerahkan :

Plt. Direktur Bina O&P Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Lolly Martina Martief

Tanggal Penyerahan :

Desember 2016

Terlampir Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 957/KPTS/M/2016 tentang Penetapan Pemenang Lomba Pemilihan Petugas Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa Teladan Tingkat Nasional untuk Unit Pelaksana Tingkat Daerah/Pengamat, Juru/Mantri Pengairan, Komunitas Peduli Sungai Tingkat Nasional, Petugas Unit Pengelola Bendungan, serta Petugas Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Teladan tingkat Nasional Tahun 2016

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran dengan melaksanakan pengukuran kinerja dan evaluasi serta menganalisa terhadap pengukuran kinerja.

Evaluasi pada tahun 2016 perlu dilakukan untuk mengetahui dan menilai capaian yang telah dihasilkan. Evaluasi berguna untuk menyusun perencanaan tahun-tahun berikutnya sebagai bahan pertimbangan dan bahan masukan sehingga pencapaian kinerja tahun mendatang bisa lebih baik.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan pada Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan 1 Memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan fungsi sumber air dan memperhatikan lingkungan sumber air :
 - Indikator Kinerja Prosentase rekomendasi teknis pengajuan SIPPA yang diselesaikan tepat waktu mendapatkan capaian sebesar 100%
 - Indikator Kinerja Prosentase intensitas tanam pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang terairi dalam 3 musim tanam mendapatkan capaian sebesar 100%
2. Tujuan 2 Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pengelola sumber daya air dan terciptanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air :
 - Indikator Kinerja Partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan Sumber Daya Air mendapatkan capaian sebesar 100%
 - Indikator Kinerja Prosentase pengelola Sumber Daya Air dan irigasi yang mengikuti diklat mendapatkan capaian sebesar 88,50%
3. Tujuan 3 Menjaga kelangsungan kondisi dan fungsi sumber air dan infrastruktur sumber daya air :
 - Indikator Kinerja Bertambahnya kapasitas tampung situ-situ di WS. Kewenangan Provinsi mendapatkan capaian sebesar 354,93%
 - Indikator Kinerja Prosentase infrastruktur Sumber Daya Air dan irigasi yang terkena bencana alam yang berhasil direhabilitasi mendapatkan capaian sebesar 100%

4. Tujuan 4 Mewujudkan jaringan irigasi yang mampu mengalirkan debit air sesuai kebutuhan:
 - Indikator Kinerja Prosentase jaringan irigasi kewenangan provinsi dalam kondisi baik mendapatkan capaian sebesar 100,01%
5. Tujuan 5 Mewujudkan jaringan irigasi yang mampu mengalirkan debit air sesuai kebutuhan:
 - Indikator Kinerja Akurasi data dalam Sistem Informasi Sumber Daya Air mendapatkan capaian sebesar 97,95%
 - Indikator Kinerja Prosentase Data Sumber Daya Air yang dilayani mendapatkan capaian sebesar 100%

4.2. TINDAK LANJUT 2018

Pada Tahun 2016 kegiatan yang dilaksanakan masih mengacu pada *money follow function*, sehingga indikator-indikator yang muncul masih kurang mengenai sasaran. Untuk perencanaan kegiatan 2018 akan disusun mengikuti arahan Permendagri no 31 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 dimana anggaran tidak berdasarkan *money follow function* lagi tetapi lebih ke *money follow program*. Berdasarkan hal tersebut diharapkan semua kegiatan dapat berkontribusi kepada pencapaian sasaran strategis Dinas PSDA.

Kemudian dengan adanya SOTK baru maka terdapat beberapa perubahan dalam tupoksi Dinas PSDA yang pada tahun 2017 menjadi Dinas SDA Provinsi Jawa Barat. Sehingga pada tahun 2017 dilakukan review terhadap Renstra sehingga dimungkinkan terdapat penyesuaian terhadap Tujuan, Sasaran dan Indikator yang ingin dicapai untuk pengukuran kinerja yang lebih efektif dan lebih baik.

LAMPIRAN - I
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA BARAT

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA BARAT
2013-2018



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 061/KEP.1409-019/2015

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Provinsi dan Organisasi Perangkat Daerah serta unit kerja mandiri lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

RESATU

: Mencabut dan menyatakan tidak berlaku:

1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.88-
Org/2012 tentang Indikator Kinerja Utama Organisasi
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Barat; dan

2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.1556-
Org/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur
Jawa Barat Nomor 061/Kep.88-Org/2012 tentang Indikator
Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

- KEDUA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat dan Organisasi Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II,
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum
KEDUA, merupakan pedoman dalam:
- penetapan pada Rencana Kerja Tahunan;
 - penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran;
 - penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja;
 - penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
 - pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Des 2015



INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2013-2018

UNIT ORGANISASI

: DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA BARAT

TUGAS POKOK

: Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Sumber Daya Air berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

FUNGSI

- Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya air;
- Penyelenggaraan pembinaan pelaksanaan teknis Sumber Daya Air yang meliputi, pembinaan perencanaan, pembinaan konstruksi, pembinaan operasi dan pemeliharaan, serta pembinaan pemanfaatan sumber daya air;
- Penyelenggaraan fasilitas dan sistem investasi pengusahaan sumber daya air;
- Penyelenggaraan saran pertimbangan teknis pemanfaatan air dan sumber air serta pelaksanaan pelayanan umum pengelolaan sumber daya air;
- Penyelenggaraan fasilitas pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;
- Penyelenggaraan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan sumber daya air;
- Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Strategis	Uraian	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air	<p>Prosentase rekomendasi teknis pengajuan SIPPA yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>Prosentase Intensitas Tanam pada Daerah irigasi Kewenangan Provinsi yang terair dalam 3 musim tanam</p>	<p>Mengukur permohonan rekomendasi dan saran teknis dalam penerbitan SIPPA dan SIPTPP yang dikeluarkan tepat waktu</p> <p>Mengukur kinerja pelayanan baik irigasi maupun sumber air lainnya melalui intensitas tanam yang dapat dilakukan dalam 1 tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bidang Bina Manfaat Renstra Dinas 2013-2018 Balai PSDA Wilayah Sungai Balai Pusat data dan informasi Renstra Dinas 2013-2018

No	Sasaran Strategis	Uraian	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
2.	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pengelola sumber daya air dan terciptanya peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan infrastruktur irigasi	Partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya air	Mengukur keterlibatan/peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan	<ul style="list-style-type: none"> Semua Unit dan Balai di lingkungan Dinas PSDA Renstra Dinas Tahun 2013-2018
3.	Meningkatnya kapasitas tampung sumber air dan berfungsi infrastruktur sumber daya air yang terkena bencana alam	Prosentase pengelola sumber daya air dan irigasi yang mengikuti diklat	Mengukur jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti diklat untuk meningkatkan kompetensi di bidang SDA dan irigasi dalam 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> Balai PSDA Wilayah Sungai Subbag Kepeg & Umum Renstra Dinas Tahun 2013-2018
		Bertambahnya kapasitas tampung situ-situ di Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Mengukur volume tampungan situ dan mata air di 2 Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi di Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> Balai PSDA Wilayah Sungai Renstra Dinas Tahun 2013-2018
4.	Meningkatnya luas layanan jaringan irigasi	Prosentase infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang terkena bencana alam yang berhasil direhabilitasi	Mengukur tingkat penanganan darurat infrastruktur SDA dan Irigasi di Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> Bidang O&P Balai PSDA Wilayah Sungai Renstra Dinas Tahun 2013-2018
		Prosentase jaringan irigasi kewenangan provinsi dalam kondisi baik	Mengukur luas layanan dan tingkat kondisi jaringan irigasi melalui oprasi, pemeliharaan dan rehabilitasi	<ul style="list-style-type: none"> Bidang O&P Balai PSDA Wilayah Sungai Renstra Dinas Tahun 2013-2018
7.	Meningkatnya sistem informasi Sumber Daya Air yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat	Akurasi data dalam Sistem Informasi Sumber Daya Air	Mengukur kevalidan data sumber daya air pada sistem informasi SDA	<ul style="list-style-type: none"> Balai Pusat Data dan Informasi Renstra Dinas Tahun 2013-2018
		Prosentase Data Sumber Daya Air yang dilayani	Mengukur kinerja Sistem Informasi Sumber Daya Air secara terpusat, terkoordinasi dan terpadu	<ul style="list-style-type: none"> Balai Pusat Data dan Informasi Renstra Dinas Tahun 2013-2018

LAMPIRAN - II

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

PROVINSI JAWA BARAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : NANA NASUHA DJUHRI, Sp.

Jabatan : KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI
JAWA BARAT

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : AHMAD HERYAWAN

Jabatan : GUBERNUR JAWA BARAT


Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang dilaksanakan dalam program dan kegiatan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Bandung, 14 November 2016

PIHAK KEDUA,


AHMAD HERYAWAN

PIHAK KESATU



NANA NASUHA DJUHRI, Sp.
Pembina Utama Muda
NIP. 195812231982111002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA BARAT

No.	SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air	Prosentase rekomendasi teknis yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		Prosentase Intensitas Tanam pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang terairi dalam 3 musim tanam	220 %
2.	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pengelola sumber daya air dan terciptanya peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan infrastruktur irigasi	Partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan Sumber Daya Air	4 tahapan
		Prosentase pengelola Sumber Daya Air dan irigasi yang mengikuti diklat	2 %
3.	Meningkatnya kapasitas tampung sumber air dan berfungsi infrastruktur sumber daya air yang terkena bencana alam	Bertambahnya kapasitas tampung situ-situ di Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	150.000 m ³
		Prosentase infrastruktur Sumber Daya Air dan irigasi yang terkena bencana alam yang berhasil direhabilitasi	100 %
4.	Meningkatnya luas layanan jaringan irigasi	Prosentase jaringan irigasi kewenangan provinsi dalam kondisi baik	72.05 %
5.	Meningkatnya sistem informasi sumber daya air yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat	Akurasi data dalam Sistem Informasi Sumber Daya Air	62 %
		Prosentase Data Sumber Daya Air yang dilayani	100 %

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya	Rp. 162.254.370.560,-	P-APBD
2.	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air lainnya	Rp. 79.446.683.060,-	P-APBD
3.	Program Pengendalian Banjir dan Kekeringan serta Pengamanan Pantai	Rp. 2.696.230.440,-	P-APBD
4.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 564.160.000,-	P-APBD
5.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp. 2.124.100.640,-	P-APBD
6.	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Rp. 3.220.616.290,-	P-APBD
7.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 23.999.602.950,-	P-APBD
8.	Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur	Rp. 2.449.163.248,-	P-APBD
9.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 9.397.783.840,-	P-APBD
10.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 7.857.752.700,-	P-APBD
11.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 150.000.000,-	P-APBD

Bandung, 14 November 2016

GUBERNUR
JAWA BARAT,


AHMAD HERYAWAN

KEPALA DINAS
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA BARAT


NANA NASUHA DJUHRI, Sp.
Pembina Utama Muda
NIP 19581223 198211 1002

LAMPIRAN - III

RENCANA KINERJA TAHUN 2016

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

PROVINSI JAWA BARAT

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA BARAT

Rencana Kinerja Tahunan Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Instansi : Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat

Sasaran			Kegiatan					Ket
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)	Program	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air	Prosentase rekomendasi teknis pengajuan SIPPA yang disediakan tepat waktu	100%	Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	1. Penerbitan Saran Teknis Air Permukaan dan Pemanfaatan Pemakaian Tanah Negara Di Jawa Barat.	Prosentase pelayanan-pengguna air permukaan, tanah negara, dan sempadan sumber air yang diselesaikan dalam waktu 21 hari terhitung berkas diterima dengan lengkap dan benar	%	100	292.494.240
				2. Perencanaan Detail Situ, Waduk dan Sungai di Jawa Barat	Prosentase gambar teknis yang disetujui untuk rekomendasi teknis pengajuan SIPPA	%	100	
				3. Manajemen DAS pada 6 Wilayah Sungai	Prosentase dokumen Analisa teknis yang disetujui untuk rekomendasi teknis pengajuan SIPPA	%	100	5.703.388.560
				4. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Air Permukaan dan Tanah Negara	Prosentase pemanfaatan ar permukaan dan tanah negara yang diawasi	%	100	387.353.000

Sasaran			Kegiatan					Ket
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)	Program	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Prosentase Intensitas Tanam pada daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang terairi dalam 3 musim tanam	220%	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	1. Pengelolaan Jaringan Irigasi pada 6 Wilayah Sungai 2. Pemantauan dan Pengembangan Potensi O&P Jaringan Irigasi di Jawa Barat	Prosentase luas lahan sawah pada Daerah irigasi kewenangan provinsi yang terairi Prosentase O&P Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah yang dipantau	% %	100 100	405.141.240
	Tersusunnya dokumen perencanaan dalam 1 tahun	5 Dok	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan Pembangunan Daerah	1. Penyusunan Dokumen Sinergitas Perencanaan Sumber Daya Air. 2. Verifikasi Bantuan Keuangan Kab/Kota di Jawa Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air Jumlah Dokumen Verifikasi Bantuan Keuangan	Dok Dok	5 27	374.160.000 190.000.000
	Tersusunnya dokumen evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan dalam 1 tahun	6 Dok	Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Capaian Kinerja dan keuangan	1. Perencanaan, Evaluasi, dan pelaporan Internal Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Dinas SDA	Dok	6	150.000.000

Sasaran			Kegiatan						
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)	Program	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (target)	Anggaran (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8		9
	Tersedianya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai yang telah tersusun dan kemudian ditetapkan / disahkan	60%	Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	1. Perencanaan Umum Sumber Daya Air Bidang Sungai, danau, dan Sumber Air Lainnya di Jawa Barat	Jumlah Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai yang telah tersusun dan kemudian ditetapkan / disahkan	%	100	-	
	Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja mendukung tupoksinya, dan terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat serta terlaksananya pembenahan sistem, prosedur, dan standarisasi kualitas pelayanan publik	69%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas, 6 Balai PSDA Wilayah Sungai, dan Balai Pusat Data dan Informasi SDA	Prosentase kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi	%	69	9.397.783.840	
	Meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat	69%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas, 6 Balai PSDA Wilayah Sungai, dan Balai Pusat Data dan Informasi SDA	Prosentase kebutuhan sarana dan prasarana yang telah ditingkatkan	%	69	23.999.602.950	

Sasaran			Kegiatan					Ket
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)	Program	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional Dinas dan UPTD dan terwujudnya kenyamanan & pelayanan kepada masyarakat	69%	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas, 6 Balai PSDA Wilayah Sungai, dan Balai Pusat Data dan Informasi SDA	Prosentase kebutuhan sarana dan prasarana yang telah dipelihara	%	69	7.857.752.700
Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pengelola sumber daya air dan terciptanya peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan infrastruktur irigasi	Partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya air	4 Tahapan	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	1. Pengelolaan Jaringan Irigasi pada 6 Wilayah Sungai 2. Perencanaan Detail Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Jawa Barat. 3. Pengelolaan Jaringan Irigasi Terpadu Lintas Kewenangan Pemerintah	Jumlah DI yang dipelihara Jumlah Dokumen Desain Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jumlah dokumen masterplan pengelolaan jaringan irigasi terpadu lintas kewenangan provinsi	DI Dok Dok	91 14 1	- 2.390.788.840 142.500.000
			Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	1. Perencanaan Umum Sumber Daya Air Bidang Sungai, danau, dan Sumber Air Lainnya di Jawa Barat.	jumlah dokumen Masterplan Penyediaan Air Baku di Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan	Dok	3	1.900.000.000

Sasaran			Kegiatan					Ket
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)	Program	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2. Survey Investigasi Rekayasa Teknik SDA	jumlah dokumen hasil survey investigasi rekayasa teknik sumber daya air	Dok	1	452.094.000
				3. Dewan SDA Provinsi Jawa Barat	Jumlah Dokumen Kegiatan Dewan SDA	Dok	1	142.500.000
				4. WISMP-2 dan Pendamping Hibah APBD Dinas PSDA Prov. Jawa Barat	Jumlah Dokumen Kegiatan WISMP Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat	Dok	1	3.376.314.000
				5. WISMP-2 dan Pendamping Hibah APBD Balai PSDA WS. Cisadea-Cibareno	Jumlah Dokumen Kegiatan WISMP Balai PSDA WS. Cisadea-Cibareno	Dok	1	4.268.682.000
			Pembinaan Jasa Konstruksi	1. Supervisi Konstruksi Bidang Sumber Daya Air	Jumlah Dokumen Supervisi Konstruksi Sumber Daya Air	Dok	6	2.933.116.290
	Prosentase pengelola sumber daya air dan irigasi yang mengikuti Diklat	2%	Pembinaan Jasa Konstruksi	1. Pembinaan Pelaksanaan dan Monitoring Kegiatan Konstruksi Di Jawa Barat	jumlah pegawai yang dibina serta dokumen hasil supervisi pelaksanaan konstruksi sumber daya air dan irigasi	Orang	50	287.500.000

Sasaran			Kegiatan					Ket
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)	Program	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	1. Peningkatan kapasitas Kegiatan Sumber Daya Air di Jawa barat	Jumlah pengelola Sumber Daya Air yang dibina dalam bidang Operasi dan pemeliharaan	Orang	50	759.465.040
	Terpenuhi kebutuhan dasar kesejahteraan dan meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	69%	Program Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur	1. Peningkatan Kesejahteraan dan kemampuan Aparatur Dinas, 6 Balai PSDA Wilayah Sungai, dan Balai Pusat Data dan Informasi SDA	Prosentase Jumlah SDM yang terpenuhi kesejahteraan dan kemampuan aparatur	%	69	2.449.163.248
	Tersusunya dokumen Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Barat	4 Dok	Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	1. Pemberdayaan Lembaga Koordinasi dan Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air	6	Dok	275.152.760
Meningkatnya kapasitas tampung sumber air dan berfungsi infrastruktur sumber daya air yang terkena bencana alam	Bertambahnya Kapasitas tampung situ-situ di Wilayah Sungai kewenangan provinsi	150.000 m ³	Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	1. Pengelolaan Situ-situ pada 2 Wilayah Sungai	Jumlah situ yang direhabilitasi/ditingkatkan	Situ	8	16.523.280.860

Sasaran			Kegiatan					Ket
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)	Program	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (target)	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Prosentase infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang terkena bencana alam yang berhasil direhabilitasi	100%	Program Pengendalian Banjir dan Kekeringan Serta Pengamanan Pantai	1. Penanganan darurat Bencana Banjir dan Kekeringan di 6 Wilayah Sungai 2. Dukungan Pengendalian Banjir dan Kekeringan di 6 Wilayah Sungai 3. Penanganan Banjir Cilencang di Kota Bandung, Kota Depok, dan Kota Bekasi	prosentase penanganan darurat infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang terkena bencana	%	100	1.906.519.440
					Jumlah Dokumen Potensi Banjir dan Kekeringan di 6 Wilayah Sungai	Dok	1	142.500.000
					Jumlah Dokumen Penanganan Banjir Cilencang	Dok	2	647.211.000
	Jumlah dan tingkat kinerja sarana dan prasarana pengendali erosi dan sedimentasi serta perlindungan sumber air	50 titik	Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	1 Perbaikan dan Pemeliharaan Sungai pada 4 (empat) Wilayah Sungai 2 Pembangunan dan pengamanan Mata Air DAS Citarum	Jumlah Sungai yang direhabilitasi untuk meminimalisir daya rusak air jumlah mata air yang berhasil ditata dan diamankan	Sungai Mata Air	19 20	6.423.824.500 2.452.369.500
	Terjaganya sempadan sumber air	2 Lokasi	Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau	1. Pengaturan Sempadan Sumber Air di Jawa Barat	Jumlah Sempadan Sumber Air yang diukur	Lokasi	2	285.000.000

Sasaran			Kegiatan					Ket
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)	Program	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			dan sumber daya air lainnya	2. Pengelolaan Terintegrasi DAS Citarum, DAS Ciliwung, dan DAS Cimanuk	Jumlah Sempadan Sumber Air yang diukur	Lokasi	2	475.000.000
	Tersedianya dokumen studi dan perencanaan situ, waduk, sungai, dan bangunan penampung air lainnya	4 Dok	Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	1 Perencanaan Detail Situ, Waduk dan Sungai di Jawa Barat.	Jumlah dokumen hasil desain rehabilitasi situ, waduk, sungai di Jawa Barat	Dok	6	1.846.297.480
	Dukungan terhadap rencana pembangunan waduk strategis	3 Waduk	Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	1 Dukungan Pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang	Dokumen sharing anggaran pembebasan lahan	Dok	1	800.000.000
				2 Dukungan Pembangunan Waduk Citeureung di Kabupaten Kuningan	Dokumen sharing anggaran pembebasan lahan	Dok	1	5.916.241.200
				3 Dukungan pembangunan Waduk Sadawarna di kab Subang	Jumlah Dokumen Sharing Anggaran Pembebasan Lahan	Dok	1	11.450.000

Sasaran		Kegiatan						Ket
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)	Program	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (target)	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4 Dukungan Pembangunan Waduk Leuwikeris di Kab Ciamis	Jumlah Dokumen Sharing Anggaran Pembebasan Lahan	Dok	1	34.500.000
				5 CLTH PPK AMDAL Pembangunan Bendungan Ciletuh	Jumlah Dokumen AMDAL Pembangunan Bendungan Ciletuh	Dok	1	420.861.000
	Tetoptimalkannya pemanfaatan situ-situ di Jawa Barat melalui : - OP - Rehab	40 Situ 7 Situ	Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	1. Pengelolaan Situ-situ pada 6 Wilayah Sungai	Jumlah Situ yang ditangani : OP Rehab	Situ Situ	50 16	26.977.385.720
Meningkatnya luas layanan jaringan irigasi	Prosentase jaringan irigasi kewenangan provinsi dalam kondisi baik	72,05%	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	1. Pengelolaan jaringan Irigasi pada 6 Wilayah Sungai	Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi	%	72,05	135.210.175.440

Sasaran		Kegiatan				Anggaran (Rp)	Ket
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)	Program	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	
1	2 Dukungan terhadap rencana pembangunan irigasi baru	3	4	5	6	7	9
		2 DI	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	1. Dukungan Pembangunan Bendung Rengrang Kabupaten Sumedang	Dokumen Sharing Anggaran Pembebasan Lahan	Dok	
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	1. Pembebasan Lahan Pembangunan DI Caringin di Kab. Sukabumi	Pembangunan DI Caringin	%	23.301.300.000
Meningkatnya sistem informasi sumber daya air yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat	Akurasi data dalam Sistem Informasi Sumber Daya Air	62%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemantauan Teknologi Informasi	1. Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air Di Jawa Barat	Tingkat keakuratan data dalam Sistem Informasi Sumber Daya Air	%	256.270.000
			Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	1. Pengelolaan dan Analisis Data Hidrologi Jawa Barat	Akurasi Data Hidrologi di Jawa Barat	%	482.494.240

Sasaran			Kegiatan					Ket
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)	Program	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Prosentase data sumber daya air yang dilayani	100%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	1. Pengelolaan Sistem Database dan Informasi Sumber Daya Air di Jawa Barat 2 Sosialisasi Pelaksanaan Pembangunan	prosentase data Sumber Daya Air yang dilayani Prosentase pembangunan bidang SDA yang diketahui masyarakat	% %	100 100	403.788.440 1.464.042.200

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2016
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA BARAT

Tabel
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPSDA Perubahan Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Provinsi Jawa Barat

Nama OPD : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air									
Lembar 01 dari 15									
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dlm juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dlm juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN WAJIB								
1 03	BIDANG URUSAN PERERAAAN UMUM								
1 03 07	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR								
1 03 07 22	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengaliran Lainnya	Outcomes : Tersedianya Jaringan Irigasi yang Handal			162.254,37				
1 03 07 22 01	Perencanaan Detail Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Jawa Barat (RAM-IP)	Output : Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis	Jawa Barat	6 Dok	2.390,79	APBD		12 Dok	4.750,00
1 03 07 22 02	Pemantuan dan Pengembangan Potensi O&P Jaringan Irigasi di Jawa Barat	Output : Terpantaunya pengembangan potensi O&P jaringan irigasi 1. Tersusunnya dan Terpantaunya Kegiatan O&P Jaringan Irigasi 2. Penyusunan RTTG DI. Kewenangan Provinsi 3. Pemberdayaan Komisi Irigasi Provinsi dan Kab./Kota	Jawa Barat	6 WS	405,14	APBD		6 WS	350,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
1				2	3	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (dalam juta)
1	03	07	20	03	Peningkatan Kapasitas Kegiatan Sumber Daya Air Di Jawa Barat	Output : Teroptimalkannya kegiatan sumber daya air di Jawa Barat 1. Terlaksananya Pelatihan Op Irigasi 2. Tersusunnya Data Konjar Irigasi Kew Prov 3. Terlaksananya Peringatan Hari Air Sedunia 4. Fasilitas Konreg OP	4 Jawa Barat	5 6 W5	759,47	APBD	5	10
1	03	07	22	04	Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Cilwung-Cisadane	Output : Meningkatkan Intensitas Tanam di DI. Kewenangan Provinsi Jawa Barat melalui Kegiatan : - Operasi dan Pemeliharaan D.I - Rehabilitasi D.I	Kab/Kota Bogor, Kota Depok	10 DI 5 DI	7.312,52	APBD	10 DI 6 DI	25.000,00
1	03	07	22	05	Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Cisadua-Cibareno	Output : Meningkatkan Intensitas Tanam di DI. Kewenangan Provinsi Jawa Barat melalui Kegiatan : - Operasi dan Pemeliharaan DI - Rehabilitasi D.I	Kab/Kota Sukabumi, Kab. Cianjur	7 DI 3 DI	9.126,70	APBD	13 DI 7 DI	40.000,00
1	03	07	22	06	Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Citarum	Output : Meningkatkan Intensitas Tanam di DI. Kewenangan Provinsi Jawa Barat melalui Kegiatan : - Operasi dan Pemeliharaan D.I - Rehabilitasi D.I	Kab. Purwakarta, Subang, Bekasi, Karawang, Bandung, Bandung Brt, Cimahi, Sumedang, Garut	31 DI 5 DI	33.363,58	APBD	40 DI 14 DI	84.000,00
1	03	07	22	07	Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung	Output : Meningkatkan Intensitas Tanam di DI. Kewenangan Provinsi Jawa Barat melalui Kegiatan : - Operasi dan Pemeliharaan D.I - Rehabilitasi D.I	Kab/Kota Cirebon, Majalengka, Kuningan, Indramayu, Sumedang, Garut	27 DI 14 DI	21.103,37	APBD	27 DI 27 DI	70.000,00

Nama OPD : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air			Rencana Tahun 2016					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (dalam juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	5	10
1 03 07 22 08	Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Citanduy	Output : Meningkatkan Intensitas Tanam di DI. Kewenangan Provinsi Jawa Barat melalui Kegiatan : - Operasi dan Pemeliharaan D.I - Rehabilitasi D.I	Kab/Kota Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kota Banjar	7 DI 7 DI	10 894,50	APBD		7 DI 7 DI	22.000,00
1 03 07 22 09	Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki	Output : Meningkatkan Intensitas Tanam di DI. Kewenangan Provinsi Jawa Barat melalui Kegiatan : - Operasi dan Pemeliharaan D.I - Rehabilitasi D.I	Kab/Kota Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Garut	6 DI 5 DI	11 015,51	APBD		6 DI 6 DI	35.000,00
1 03 07 22 10	Pembebasan Lahan dan Pembangunan DI. Caringin di Kab. Sukabumi	Output : terlaksananya dukungan pembangunan DI. Caringin: - Pembebasan lahan dan pembangunan bendung - Pembangunan saluran induk	Kab. Sukabumi	1 DI 1 Bh	23 301,30	APBD		1 DI	120.000,00
1 03 07 22 11	Dukungan Pembangunan Bendung Rengrang di Kab. Sumedang	Output : Tersedianya lahan untuk pembangunan Bendung Rengrang.	Kab. Sumedang	- Ha	45,00	APBD		2 Ha	2.500,00
1 03 07 22 12	Pengelolaan jaringan irigasi Terpadu Lintas Kewenangan Pemerintah (RAM-IP)	Output : Meningkatnya pengelolaan jaringan irigasi di Jawa Barat	Jawa Barat	6 WS	142,50	APBD		6 WS	3.000,00
1 03 07 22 13	Dukungan DAK Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Jawa Barat	Output : tersedianya dukungan DAK berupa Monitoring dan supervisi kegiatan DAK rehabilitasinya jaringan irigasi di Jawa Barat	Jawa Barat	1 keg	2.490,22	APBD		1 keg	2.500,00
1 03 07 22 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (DAK)	Output : Terehabilitasinya Jaringan Irigasi	Kota Bogor	4 DI	6.970,12	DAK		5 DI	10.000,00
1 03 07 22 15	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Cisadane-Cibareno (DAK)	Output : Terehabilitasinya Jaringan Irigasi	Kota Sukabumi	3 DI	4.854,86	DAK		4 DI	10.000,00
1 03 07 22 16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Citarum (DAK)	Output : Terehabilitasinya Jaringan Irigasi	Kota Bandung	2 DI	6 990,96	DAK		3 DI	10.000,00

Nama OPD : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
Kode							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (dalam juta)
1		2		3		4	5	6	7	8	9	10	
1	03	07	22	17	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung (DAK)	Ouput : Terehabilitasinya Jaringan Irigasi	Kota Cirebon	1 Di	9.896,30	DAK		3 Di	20.000,00
1	03	07	22	18	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Citanduy (DAK)	Ouput : Terehabilitasinya Jaringan Irigasi	Kota Tasikmalaya	1 Di	7.290,57	DAK		3 Di	12.000,00
1	03	07	22	19	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki (DAK)	Ouput : Terehabilitasinya Jaringan Irigasi	Kota Tasikmalaya	3 Di	3.900,99	DAK		5 Di	7.000,00
1	03	07	23		Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya	Outcomes : Meningkatkan Kondisi Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung konservasi, pendayagunaan SDA, serta pengendalian daya rusak air			79.446,68				
1	03	07	23	01	Perencanaan Umum Sumber Daya Air Bidang Sungai, Situ dan Sumber Air Lainnya di Jawa Barat	Output : Tersedianya draft PerGub Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air WS Ciwulan-Cilaki, Masterplan bidang SDA dan Pengairan di 2 Metropolitan, Masterplan bidang SDA dan Pengairan di 1 Pusat pertumbuhan	1 WS	3 Dok	1.900,00	APBD		2 Dok	1.000,00
1	03	07	23	02	Perencanaan Detail Situ, Waduk dan Sungai di Jawa Barat	Output : Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Waduk, Situ dan Sungai di Jawa barat	Kab. Sukabumi, Kab.Kota Tasik, Kab. Ciamis	6 Dok	1.846,30	APBD		15 dok	7.500,00
1	03	07	23	03	Penyelesaian Dampak Sosial di lingkungan Waduk Jatigede (RAM-IP)	Output : Terselaksainnya dampak sosial pembangunan Waduk Jatigede Kab Sumedang	Kab. Sumedang	1 Sam-set	800,00	APBD		1 Sam-sat	1.000,00
1	03	07	23	04	Dukungan pembangunan Waduk Cileuweung di Kab. Kuningan	Output : Tersedianya lahan untuk persiapan Pembangunan Waduk Kuningan	Kab. Kuningan	5 Ha	5.888,19	APBD		1 Ha	1.500,00
1	03	07	23	05	Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Air Permukaan dan Tanah Negara	Output : Terkendalnya pemanfaatan air permukaan dan tanah negara 1. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Penggunaan Air Permukaan Thd Kepemilikan Izin Penggunaan Air Permukaan	Jawa Barat	6 WS	387,35	APBD		6 WS	350,00

Nama OPD : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Nama OPD : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air												Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2016					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (dalam juta)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (dim juta)	Sumber Dana	Catatan Penting				
1		2		3		4	5	6	7	8	5		10	
				2. Data NPA 3. Penyidikan dan Penertiban Lapangan Pengguna Air Permukaan Sesuai Perda No. 10/2001 4. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Tanah Negara										
1	03 07 23 06	Pengaturan Sempadan Sumber Air di Jawa Barat		Output : Tersedianya Per.Men. Sempadan Sumber Air - Tersusunnya Draft Per.Men Ttg Batas Garis Sempadan Sungai Citarum Segmen III - Tersosialisasinya Per.Men Sempadan Sungai Citarum Segmen III - Terawasi dan terkendalinya pemanfaatan daerah sempadan sumber air Sungai Citarum Segmen III		Kota Bandung	1	Draft Per-Mon	285,00	APBD	2		Draft Per-Gub	500,00
1	03 07 23 07	Penerbitan Saran Teknis Air Permukaan dan Pemanfaatan Pemakaian Tanah Negara di Jawa Barat		Output : Meningkatnya penerbitan saran teknis pengambilan & pemanfaatan air permukaan dan pemakaian tanah negara 1. Terbitnya Saran Teknis Izin : Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan pemakaian Tanah Negara 2. Rapat Koordinasi Pemanfaatan Air Permukaan Teknis pemanfaatan tanah negara 3. Sosialisasi Per. Gub. Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 4. Penyusunan Rancangan Pergub tentang Pemakaian Tanah Negara Bidang Pengaliran		Jawa Barat	6	WS	292,49	APBD	6		WS	350,00

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	03 07 23 08	Pemberdayaan Lembaga Koordinasi dan Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi	Output : Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Koordinasi dan Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi 1. Terfasilitasinya Prog MPU bid Pengairan 2. Terfasilitasinya Perjanjian Kerjasama antara Pusat, Provinsi dan Kab/kota 3. Terfasilitasinya Perjanjian Kerjasama Situ /Daerah Irigasi antara Provinsi & Kab/kota 4. Fasilitasi GN-KPA 5. Fasilitasi Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Barat 6. Fasilitasi Perjanjian Kerjasama Pembangunan Di. Caringin 7. Fasilitasi Perjanjian Kerjasama Situ antara Pusat dan Provinsi 8. Fasilitasi Perjanjian Kerjasama Situ antara Provinsi dan Kab./ Kota	Jawa Barat	6 Keg	275,15	APBD	6 Keg		5	350,00
1	03 07 23 09	Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat	Terlaksananya Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat	1 Keg	142,50	APBD	2 Keg		2	300,00
1	03 07 23 10	Pengelolaan Situ-situ Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane	Output : Terpeliharanya kondisi dan optimalnya pemanfaatan fungsi situ serta terlaksananya rehabilitasi situ : - Operasi & Pemeliharaan Situ - Rehabilitasi Situ Tonjong Tahap I	Kab Bogor	40 Situ 1 Situ	5.000,00	APBD	40 Situ 1 Situ		40 Situ 1 Situ	15.000,00
1	03 07 23 11	Pengelolaan Situ situ Wilayah Sungai Cisadane-Cibareno	Output : Terpeliharanya kondisi dan optimalnya pemanfaatan fungsi situ serta terlaksananya rehabilitasi situ : - Operasi & Pemeliharaan Situ - Rehabilitasi Situ	Kab Sukabumi & Kab. Cianjur	19 Situ 1 Situ	2.230,80	APBD	20 Situ 10 Situ		20 Situ 10 Situ	10.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (dlm juta)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (dlm juta)	
1	03	07	23	12	Pengelolaan Situ-situ Wilayah Sungai Citarum	Output : Terpeliharanya kondisi dan optimalnya pemanfaatan fungsi situ serta terlaksananya rehabilitasi situ : - Operasi & Pemeliharaan Situ - Rehabilitasi Situ	4 Kab. Purwakarta, Kab / Kota Bandung, Kota Cimahi	5	6	7	8	5	10
1	03	07	23	13	Pengelolaan Situ-situ Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung	Output : Terpeliharanya kondisi dan optimalnya pemanfaatan fungsi situ serta terlaksananya rehabilitasi situ : - Operasi & Pemeliharaan : - Rehabilitasi :	Kab Kuningan	13 Situ 1 Wa-duk/ Situ	2.988,86	APBD		16 Situ 5 Situ	17.750,00
1	03	07	23	14	Pengelolaan Situ-situ Wilayah Sungai Citanduy	Output : Terpeliharanya kondisi dan optimalnya pemanfaatan fungsi situ serta terlaksananya rehabilitasi situ : - Operasi & Pemeliharaan Situ (bh) - Rehabilitasi Situ (bh)	Kab. Ciamis	6 Situ 3 Situ	1.820,72	APBD		6 Situ 4 Situ	3.459,85
1	03	07	23	15	Pengelolaan Situ-situ Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki	Output : Terpeliharanya kondisi dan optimalnya pemanfaatan fungsi situ serta terlaksananya rehabilitasi situ : - Operasi & Pemeliharaan Situ (bh) - Rehabilitasi Situ (bh)	Kab/Kota Tasikmalaya	9 Situ/ kawa h 4 Situ/ kawa h	14.292,48	APBD		9 Situ/ kawa h 6 Situ/ kawa h	14.787,15

Nama OPD : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2016				Catatan Penting		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)
1	03	07	23	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	03	07	23	16	Pengelolaan dan Analisis Data Hidrologi Jawa Barat	Output : Terlaksananya Pengelolaan dan Analisis Data Hidrologi Jawa Barat 1. Pengumpulan Data Debit Sungai Harian 2. Data Debit Sungai dan Curah Hujan Hasil Pengolahan 3. Pelatihan Pengukuran Hidrologi 4. Pengukuran Debit Sungai Rutin 4 kali/Tahun 5. Pengadaan Pelschaal	Kota Bandung	6 WS	482,49	APBD	6 WS	850,00	6 WS	850,00
1	03	07	23	17	Manajemen DAS Balai PSDA Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane	Output : Tersedianya Data Base Sumber Daya Air pada WS. Ciliwung-Cisadane	WS. Ciliwung-Cisadane	1 WS	734,26	APBD	1 WS	1.302,35	1 WS	1.302,35
1	03	07	23	18	Manajemen DAS Balai PSDA Wilayah Sungai Cisadane-Cibareno	Output : Tersedianya Data Base Sumber Daya Air pada WS. Cisadane-Cibareno	WS. Cisadane-Cibareno	1 WS	1.153,28	APBD	1 WS	1.470,00	1 WS	1.470,00
1	03	07	23	19	Manajemen DAS Balai PSDA Wilayah Sungai Citarum	Output : Tersedianya Data Base Sumber Daya Air pada WS. Citarum	WS. Citarum	1 WS	896,22	APBD	1 WS	1.500,00	1 WS	1.500,00
1	03	07	23	20	Manajemen DAS Balai PSDA Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung	Output : Tersedianya Data Base Sumber Daya Air pada WS. Cimanuk-Cisanggarung	WS. Cimanuk-Cisanggarung	1 WS	972,34	APBD	1 WS	1.000,00	1 WS	1.000,00
1	03	07	23	21	Manajemen DAS Balai PSDA Wilayah Sungai Citanduy	Output : Tersedianya Data Base Sumber Daya Air pada WS. Citanduy	WS. Citanduy	1 WS	931,43	APBD	1 WS	1.000,00	1 WS	1.000,00
1	03	07	23	22	Manajemen DAS Balai PSDA Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki	Output : Tersedianya Data Base Sumber Daya Air pada WS. Ciwulan-Cilaki	WS. Ciwulan-Cilaki	1 WS	1.015,86	APBD	1 WS	1.200,00	1 WS	1.200,00
1	03	07	23	23	Perbaikan dan Pemeliharaan Sungai Wilayah Sungai Cisadane-Cibareno	Output : Terlaksananya Perbaikan dan Pemeliharaan Sungai - Rehabilitasi	WS. Cisadane-Cibareno	2 Titik sungai	1.938,59	APBD	11 Titik sungai	12.000,00	11 Titik sungai	12.000,00

Nama OPD : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air				Rencana Tahun 2016					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (d/m juta)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (d/m juta)
1	2			3	4	5	6	7	8	5	10
1 03 07 23 24	Perbaikan dan Pemeliharaan Sungai Wilayah Sungai Citarum			Output : Terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan sungai - Pengadaan konstruksi	WS. Citarum		1.500,00	APBD		11 sungai	12.900,00
1 03 07 23 25	Perbaikan dan Pemeliharaan Sungai Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki			Output : Terlaksananya Perbaikan dan Pemeliharaan Sungai - Rehabilitasi	WS. Ciwulan-Cilaki		2.212,06	APBD		7 sungai	14.889,40
1 03 07 23 26	Program WISMP 2 Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat			Output : Terlaksananya koordinasi kegiatan WISMP	Jawa Barat	1 Keg	3.376,31	APBD + APBN		1 Keg	4.000,00
1 03 07 23 27	Program WISMP Balai PSDA WS. Cisadco-Cibareno			Output : Terlaksananya koordinasi kegiatan WISMP	Jawa Barat	1 Keg	4.268,68	APBD + APBN		1 Keg	3.300,00
1 03 07 23 28	Survey Investigasi Rekayasa Teknik Sumber Daya Air			Output : Tersedianya Data Kajian dan Potensi Sumber Daya Air	Jawa Barat	2 dok	452,09	APBD		3 dok	750,00
1 03 07 23 29	Pengelolaan Terintegrasi DAS Citarum, DAS Ciliwung, dan DAS Cimankuk (RAM IP)			Output : Terintegrasinya pengelolaan 3 DAS di Jawa Barat	Jawa Barat	1 DAS	475,00	APBD		3 DAS	500,00
1 03 07 23 30	Dukungan pembangunan Waduk Sadawarna Kab. Subang			Output : Tersedianya lahan untuk dukungan pembangunan Waduk Sadawarna	Kab. Subang	Ha	39,50	APBD		2 Ha	2.500,00
1 03 07 23 31	Pembangunan dan Pengamanan Mata Air DAS Citarum (RAM-IP)			Output : Terlaksananya pembangunan dan pengamanan mata air DAS Citarum	Jawa Barat	25 Titik	2.452,37	APBD		25 Titik	5.000,00
1 03 07 23 32	Perbaikan dan Pemeliharaan Sungai WS. Cimankuk-Cisanggarung			Output : terkendalinya daya rusak air	Jawa Barat	1 Titik sungai	773,17	APBD		16 Sungai	43.262,93
1 03 07 23 33	Dukungan pembangunan Waduk Leuwikeris Kab. Ciamis			Output : Tersedianya lahan untuk dukungan pembangunan Waduk Leuwikeris	Kab. Ciamis	Ha	34,50	APBD		2 Ha	2.500,00
1 03 07 23 34	CLTH PPK AMDAL Pembangunan Bendungan Ciletuh			Output : Tersedianya AMDAL Pembangunan Bendungan Ciletuh	Kab. Sukabumi	1 Dok	420,86	APBD			

Nama OPD : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air		Rencana Tahun 2016							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
Kode	Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta)	
1	1	3	4	5	6	7	8	5	10	
1 03 07 24	Program Pengendalian Banjir Dan Kekeringan serta Pengamanan Pantai	Outcomes: Tersedianya Infrastruktur SDA yang dapat mengendalikan banjir, kekeringan serta pengamanan pantai	Jawa barat	11,3 %	142,50	APBD		11,3 %	150,00	
1 03 07 24 01	Dukungan Pengendalian Banjir dan kekeringan di 6 WS	Tersedianya Data Potensi Bencana Banjir dan Kekeringan	Jawa Barat	6 WS	1.906,52	APBD		6 WS	5.000,00	
1 03 07 24 02	Penanggulangan Bencana Banjir dan Kekeringan	Output : Tertanganinya / tertanggulangnya bencana banjir dan kekeringan	Kota Bandung, Depok, Bekasi	2 Dok	647,21	APBD		1 dok	1.000,00	
1 03 07 23 03	Penanganan Banjir Cileuncang di Kota Bandung, Kota Depok, dan Kota Bekasi (RAM-IP)	Output : Tersusunnya dok, pengendalian Banjir Cileuncang di kota Bandung, Kota Depok, Kota Bekasi								
1 03 07 26	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Output : Terkandalnya Pelaksanaan Konstruksi Bidang Sumber Daya Air di Jawa Barat	Jawa barat	1 dinas dan 7 Balai PSDA	3.220,62	APBD		1 dinas dan 7 Balai PSDA	400,00	
1 03 07 26 01	Pembinaan Pelaksanaan dan Monitoring Keg Konstruksi di Jawa Barat	Output : terlaksananya supervisi konstruksi pekerjaan PSDA	Jawa Barat	1 dinas dan 7 Balai PSDA	2.933,12	APBD		1 dinas dan 7 Balai PSDA	15.000,00	
1 03 07 26 02	Supervisi Konstruksi Bidang Sumber Daya Air									
1 03 02 29	Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah	Output : Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan daerah spasial dan sektoral 1. Penyusunan Renstra OPD/Biro 2014 - 2018 2. Fasilitas Musrenbang / Kewilayahan 3. Fasilitas Penyelenggaraan forum OPO 4. Fasilitas penyelenggaraan Rakortas	Jawa Barat	95 %	374,16	APBD		95 %	400,00	
1 03 02 29 01	Penyusunan Dokumen Sinergitas Perencanaan Sumber Daya Air		6 (Enam) WS.							
1 03 02 29 02	Verifikasi Bantuan Keuangan Kab/Kota di Jawa Barat	Output : Terlaksananya verifikasi, monitoring dan evaluasi bantuan keuangan dan hibah	Jawa Barat	1 keg	190,00	APBD		1 keg	200,00	

Kode	Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (djm juta)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (djm juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 03 07 53	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi				2.124,10				
1 03 07 53 01	Pengelolaan Sistem Data Base dan Informasi Sumber Daya Air di Jawa Barat	Tersedianya Data Potensi Sumber Daya Air 1. Booklet Balai Oata dan Informasi 2. Buku Publikasi Daerah Data Inngasi Kewenangan Prov. Jawa Barat (Edisi Iux)	Kota Bandung	25 Buku	403,79	APBD		25 Bu-ku	400,00
1 03 07 53 02	Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air di Jawa Barat	Tersedianya : 1. Sistem Informasi Data SDA di Jawa Barat 2. Pengembangan Intranet Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung	1 keg	256,27	APBD		1 keg	400,00
1 03 07 53 03	Sosialisasi Pelaksanaan Pembangunan	Tersedianya Media Sosialisasi - Media Sosialisasi SDA (Souvenir Pamoran) - Majalah Bulanan - Booklet SDA - Leaflet - Buku Profile Dinas - Buku Saku Perundang-undangan - LED Megatron	Kota Bandung	1 keg	1.464,04	APBD		1 keg	300,00
1 03 07 59	Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur	Terperuhnya kebutuhan operasional unit kerja Dinas PSDA untuk mendukung kinerja pegawai, dan Terwujudnya kesejahteraan pegawai untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat			2.449,16				
1 03 07 59 01	Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Kantor Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat	Meningkatnya kesejahteraan dan kemampuan aparatur	Kota Bandung	1 Dinas	1.332,91	APBD		1 Dinas	1.800,00

Nama OPD : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air				Rencana Tahun 2016				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (dlm juta)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (dlm juta)
1		2	3	4	5	6	7	8	5	10
1	03	07	59	02	Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Kantor Balai PSDA WS Ciliwung-Cisadane	Meningkatnya kesejahteraan dan kemampuan aparatur	Kota Bogor	1 Balai	1 Balai	332,75
1	03	07	59	03	Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Kantor Balai PSDA WS Cisadane-Cibarende	Meningkatnya kesejahteraan dan kemampuan aparatur	Kota Sukabumi	1 Balai	1 Balai	120,00
1	03	07	59	04	Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Kantor Balai PSDA WS Citarum	Meningkatnya kesejahteraan dan kemampuan aparatur	Kota Bandung	1 Balai	1 Balai	228,00
1	03	07	59	05	Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Kantor Balai PSDA WS Cimanuk-Cisangarug	Meningkatnya kesejahteraan dan kemampuan aparatur	Kota Cirebon	1 Balai	1 Balai	145,65
1	03	07	59	06	Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Kantor Balai PSDA WS Citanduy	Meningkatnya kesejahteraan dan kemampuan aparatur	Kota Tasikmalaya	1 Balai	1 Balai	94,00
1	03	07	59	07	Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Kantor Balai PSDA WS Ciwulan-Cilaki	Meningkatnya kesejahteraan dan kemampuan aparatur	Kota Tasikmalaya	1 Balai	1 Balai	84,60
1	03	07	59	08	Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Balai Data dan Informasi Sumber Daya Air	Meningkatnya kesejahteraan dan kemampuan aparatur	Kota Bandung	1 Balai	1 Balai	306,63
1		03	07	60	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhi nya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Bandung	1 Dinas	1 Dinas	6.775,00
1	03	07	60	01	Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat	Terselenggaranya kegiatan administrasi perkantoran	Kota Bogor	1 Balai	1 Balai	637,21
1	03	07	60	02	Pelayanan Administrasi Perkantoran Balai PSDA WS Ciliwung-Cisadane	Terselenggaranya kegiatan administrasi perkantoran	Kota Sukabumi	1 Balai	1 Balai	675,00
1	03	07	60	03	Pelayanan Administrasi Perkantoran Balai PSDA WS Cisadane-Cibarende	Terselenggaranya kegiatan administrasi perkantoran	Kota Bandung	1 Balai	1 Balai	1.000,00
1	03	07	60	04	Pelayanan Administrasi Perkantoran Aparatur Kantor Balai PSDA WS Citarum	Terselenggaranya kegiatan administrasi perkantoran	Kota Bandung	1 Balai	1 Balai	1.000,00

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016					Catatan Penting		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dlm juta)	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dlm juta)
1	03 07 60	2	3	4	5	6	7	8			5	10
1	03 07 60	Pelayanan Administrasi Perkantoran Aparatur Kantor Balai PSDA WS Cimanuk-Cisanggarung	Terselenggaranya kegiatan administrasi perkantoran	Kota Cirebon	1 Balai	922,08	APBD				1 Balai	775,35
1	03 07 60	Pelayanan Administrasi Perkantoran Aparatur Kantor Balai PSDA WS Citanduy	Terselenggaranya kegiatan administrasi perkantoran	Kota Tasikmalaya	1 Balai	684,36	APBD				1 Balai	614,40
1	03 07 60	Pelayanan Administrasi Perkantoran Aparatur Kantor Balai PSDA WS Ciwulan-Citaki	Terselenggaranya kegiatan administrasi perkantoran	Kota Tasikmalaya	1 Balai	458,08	APBD				1 Balai	388,50
1	03 07 60	Pelayanan Administrasi Perkantoran Aparatur Kantor Balai Data dan Informasi Sumber Daya Air	Terselenggaranya kegiatan administrasi perkantoran	Kota Bandung	1 Balai	279,89	APBD				1 Balai	318,90
1	03 07 61	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai			23.999,60						
1	03 07 61	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Kota Bandung	1 Dinas	9.931,97	APBD				1 Dinas	27.550,00
1	03 07 61	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai PSDA WS Ciliwung-Cisadane	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Kota Bogor	1 Balai	3.314,26	APBD				1 Balai	7.073,00
1	03 07 61	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai PSDA WS Cisadane-Cibareho	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Kota Sukabumi	1 Balai	452,00	APBD				1 Balai	1.250,00
1	03 07 61	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai PSDA WS Citarum	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Kota Bandung	1 Balai	7.320,97	APBD				1 Balai	8.620,70
1	03 07 61	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai PSDA WS Cimanuk-Cisanggarung	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai dan terlaksananya pembangunan gedung kantor Balai PSDA WS Cimanuk-Cisanggarung	Kota Cirebon	1 Balai	1.148,84	APBD				1 Balai	1.373,75
1	03 07 61	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai PSDA WS Citanduy	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai dan terlaksananya pembangunan gedung kantor Balai PSDA WS Citanduy	Kota Tasikmalaya	1 Balai	905,64	APBD				1 Balai	1.200,00

SK DAN SOP PENYUSUNAN LKIP TAHUN 2016
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA BARAT



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS SUMBER DAYA AIR

Jl. Braga No. 137 Bandung
Telp. (022) 4215243 / 4236113 Fax. (022) 4215243 / 4219849
Email : dispsda@jabarprov.go.id Website : www.psda.jabarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 061.1/SK.12/PP/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKIP) DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2016, perlu dibentuk Tim Penyusun LKIP Dinas SDA Provinsi Jawa Barat;
 - b. Bahwa untuk maksud sebagaimana pada pertimbangan huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air provinsi Jawa Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli Tahun 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Instruksi Presiden Republik Indonesia No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Lembaga Administrasi Negara No.239/IX/6/8/2003 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Sumber Daya Air di Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.
- KEDUA :** Tim Penyusun LKIP Dinas Tahun 2016, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk menyusun LKIP Dinas SDA Provinsi Jawa Barat TA. 2016.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugas hendaknya berpedoman kepada :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
 4. Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018
 5. Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

6. Rencana Strategis (Renstra) Dinas PSDA Provinsi Jawa barat Tahun 2013-2018
7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016.
8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : di Bandung
Pada tanggal : 23 Januari 2017

KEPALA DINAS
SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA BARAT



NANA NASUHA DJUHRI, Sp.1
Pembina Utama Muda
NIP. 19581223 198211 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP)
Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Nomor : 061.1/SK.12/PP/2017
Tanggal : 23 Januari 2017

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN TIM
1	NANA NASUHA DJUHRI, Sp.1	Kepala Dinas SDA Prov. Jawa Barat	Penanggung Jawab
2	Ir. JAJAT SUDRAJAT, M.Si.	Sekretaris Dinas SDA Prov. Jawa Barat	Ketua
3	BAMBANG IMANUDIN, ST., MT.	Kepala Sub Bagian Perencanaan & Pelaporan	Sekretaris
4	Dra. LIA FAUZIAH	Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Anggota
5	EKO PRIASTONO, ST., MPPM.	Kepala Bidang Bina Perencanaan Teknik	Anggota
6	Ir. NI LUH WARNI ASTUTI, MM.	Kepala Bidang Bina Konstruksi	Anggota
7	ANDRI HERIYANTO, ST., MT.	Kepala Bidang Bina Operasi dan Pemeliharaan	Anggota
8	BOY IMAN NUGRAHA ST, MT	Kepala Bidang Bina Manfaat	Anggota
9	Ir. AZHARI DWIKORA, Sp.	Kepala Balai PSDA WS. Citarum	Anggota
10	TEDDY MARYADI, Sp.	Kepala Balai PSDA WS. Citanduy	Anggota
11	Ir. AL ASYHARRY D.N.	Kepala Balai Data dan Informasi SDA	Anggota
12	APIT BACHRUL, ST., M.Si	Kepala Balai PSDA WS. Cimanuk - Cisanggarung	Anggota
13	WANDI YUSWANDI, ST.	Kepala Seksi Irigasi Balai PSDA WS. Ciliwung-Cisadane	Anggota
14	RONALD HUTAURUK, ST.	Kepala Seksi Sundawapan Balai PSDA WS. Ciliwung-Cisadane	Anggota


No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN TIM
15	SHITA ANDRIYANI, ST., MT.	Operator Perencana SKPD	Anggota
16	DONNY SISWANTO, Sp., M.Si.	Operator Perencana SKPD	Anggota
17	WIGIANA NOPIANTI, S.Si.	Operator Perencana SKPD	Anggota
18	FADLY FAHMI	Staf Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

Ditetapkan : di Bandung
Pada tanggal : 23 Januari 2017

KEPALA DINAS
SARANA DAYA AIR
PROVINSI JAWA BARAT



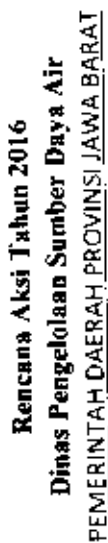
NASUHA DJUHRI, Sp.1
Pembina Utama Muda
NIP. 19681223 198211 1 002

	Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dinas Sumber Daya Air		Nomor SOP	35.4.2018
			Tanggal Pembuatan	Agustus 2016
			Tanggal Revisi	Januari 2017
			Tanggal Efektif	Januari 2017
			Disahkan oleh	Kepala Dinas SDA Provinsi Jawa Barat
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan			Judul SOP	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas SDA Provinsi Jawa Barat
Daftar hukum :				
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme				
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan				
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29/2010 tentang Penetapan Kinerja dan LAKIP				
4. Keputusan LAN No. 238/MX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan				
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Unsur Pemerintahan Provinsi Jawa Barat				
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Unsur Pemerintahan Provinsi Jawa Barat				
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat				
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat				
9. Keputusan Gubernur Nomor 061/Kep. 1409-Orq/2015 tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat				
Keterangan :				
- SOP Alur Surat Masuk dan Surat Keluar				
- SOP Pencarian Data dan Informasi				
- SOP Penetapan Kinerja				
- SOP Pengadaan Barang dan Jasa				
- SOP Pengarsipan				
Peringatan :				
LKIP sebagai dokumen pertanggung-jawaban atas Kinerja SKPD. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan LKIP ini tidak akan berjalan lancar				
Pencatatan dan Pendataan :				
Indikator Kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian kinerja				

Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat

No	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku			Keterangan
		Start	Sub Bagian PP dan Tim Penyusun LKIP	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Memerintahkan penyusunan LKIP Dinas SDA Provinsi Jawa Barat					Disposisi Surat	10 menit	Disposisi Surat	SOP alir surat masuk dan surat keluar
2.	Membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing balai, bidang dan sekretariat					Format penyusunan LKIP Dinas SDA Provinsi Jawa Barat	2 Jam	Format penyusunan LKIP Dinas SDA Provinsi Jawa Barat	
3.	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja kepada masing-masing balai, bidang dan sekretariat					Format penyusunan LKIP Dinas SDA Provinsi Jawa Barat	1 Jam	Format penyusunan LKIP Dinas SDA Provinsi Jawa Barat	
4.	Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing-masing balai, bidang dan sekretariat					Format penyusunan LKIP Dinas SDA Provinsi Jawa Barat	3 jam	Format penyusunan LKIP Dinas SDA Provinsi Jawa Barat	SOP pencarian data dan informasi Sumber Daya Air
5.	Menganalisa dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul					Format penyusunan LKIP Dinas SDA Provinsi Jawa Barat	4 hari	Draft LKIP Dinas SDA Provinsi Jawa Barat	SOP Penetapan Kinerja
6.	Membuat dokumen LKIP Dinas SDA Provinsi Jawa Barat					Draft LKIP Dinas SDA Provinsi Jawa Barat	2 hari	Dokumen LKIP Dinas SDA Provinsi Jawa Barat	SOP Penetapan Kinerja
7.	Mengkoreksi Dokumen LKIP Dinas SDA Provinsi Jawa Barat					Dokumen LKIP Dinas SDA Provinsi Jawa Barat	1 Hari	Dokumen LKIP Dinas SDA Provinsi Jawa Barat	Hasil Analisis dan evaluasi capaian kinerja, dan realisasi keuangan
8.	Menyampaikan Dokumen LKIP kepada Kadis untuk memintakan persetujuan					Dokumen LKIP Dinas SDA Provinsi Jawa Barat	1 jam	Dokumen LKIP Dinas SDA Provinsi Jawa Barat	Konsep LKIP Dinas SDA Provinsi Jawa Barat
9.	Penandatanganan Dokumen LKIP Dinas SDA Provinsi Jawa Barat oleh Kadis kemudian diteruskan ke Kasubag PP					Dokumen LKIP Dinas SDA Provinsi Jawa Barat	10 menit	Disposisi persetujuan dokumen LKIP	Dokumen LKIP Dinas SDA Provinsi Jawa Barat
10.	Membuat Surat Pengantar pengirim sekaligus penomoran surat, kemudian diserahkan ke staf untuk dikirimkan kepada Bappeda, Biro Organisasi, dan lainnya					Konsep Surat Pengantar	15 menit	Surat Pengantar	SOP alir surat masuk dan surat keluar
11.	mengantarkan surat, menggandakan, dan mengarsipkan Dokumen LKIP Dinas SDA Provinsi Jawa Barat					Dokumen LKIP Dinas SDA Provinsi Jawa Barat	1 jam	Dokumen LKIP Dinas SDA Provinsi Jawa Barat	SOP Pengadaan barang dan Jasa dan SOP Pengarsipan

RENCANA AKSI TAHUN 2016
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA BARAT



Dinas Peggelalaan Sumber Daya Air

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Program	Kegiatan	Aktivitas	Target Keuangan			
			Tthw I	Tthw II	Tthw III	Tthw IV				Tthw I	Tthw II	Tthw III	Tthw IV
1	Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air	3	42%	54%	75%	100%	Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	9	10	11	12	13	14
		Presentase rekomendasi teknis pengajuan SIPA yang disediakan tepat waktu						1. Pemertihan Saran Teknis Air Permukaan dan Pemanfaatan Pemukiman Tumbuh Negara Di Jawa Barat	Pemberian rekomendasi teknis permukaan air, tanah, negara, dan sempadan sumber air	72.855.150	119.298.450	216.445.050	252.494.240
								2. Perencanaan Detail Situasi, Waduk dan Sungai di Jawa Barat	Pemberian rekomendasi teknis yang disertai untuk rekomendasi teknis pengisian SIPA	1.324.147.600	2.894.141.500	4.427.360.400	5.703.388.560
								3. Manajemen DAS pada 6 Wilayah Sungai	Penyusunan Pengelolaan Data Hidrologi dan penggunaan air permukaan dan tanah	67.040.000	198.170.000	315.360.000	387.353.000
								4. Pengawasan dan Pengendalian Pemertihan Air Permukaan dan Tanah	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air permukaan dan tanah				
								5. Pengembangan Jaringan Irigasi pada 16 Wilayah Sungai	Pengembangan dan pemertihan jaringan irigasi				
								6. Pemertihan dan Pengembangan Jaringan Irigasi di Jawa Barat	Pemertihan pelaksanaan irigasi	47.600.000	143.675.000	272.150.000	405.141.240
								7. Penyusunan Dokumen Strategis Pengembangan Sumber Daya Air	Penyusunan Dokumen Pengembangan Sumber Daya Air melalui Musrenbang dan Forum OPT	186.150.000	296.025.000	293.700.000	374.160.000
								8. Verifikasi Bantuan Keuangan Kab/Kota di Jawa Barat	Verifikasi Bantuan Keuangan	46.750.000	96.300.000	168.350.000	190.000.000

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Program	Kegiatan	Aktivitas	Target Keuangan			
			Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV				Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV
			4	5	6	7				11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Tersusunnya dokumen evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan dalam 1 tahun	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Perencanaan, Evaluasi, dan pelaporan Internal Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Dinas SIDA	19.700.000	75.537.500	131.375.000	150.000.000
		Tersedianya Pola dan Rencana Pengelolaan SIDA pada Wilayah Sungai yang telah tersusun dan kemudian ditetapkan / disahkan	2,5%	41%	51%	64%	Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	1. Perencanaan Umum Sumber Daya Air Bidang Sungai, danau, dan Sumber Air lainnya di Jawa Barat	Penyusunan Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SIDA pada Wilayah Sungai yang telah tersusun dan kemudian ditetapkan / disahkan				
		Terperolehnya Terpenuhi dan kebutuhan dasar operasional unit kerja mendukung terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat serta terlaksananya pembenahan sistem, prosedur, dan standarisasi kualitas pelayanan publik	67,00%	67,50%	68,50%	69,00%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas, 6. Balai PSDA Wilayah Sungai, dan Balai Pusat Data dan Informasi SIDA	Pemenuhan Kebutuhan administrasi perkantoran	2.027.366.125	3.979.536.050	6.327.215.375	9.367.763.840
		Meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat	67,00%	67,50%	68,50%	69,00%	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas, 6. Balai PSDA Wilayah Sungai, dan Balai Pusat Data dan Informasi SIDA	Pengukutan sarana dan prasarana kantor	3.146.923.600	13.604.373.600	19.125.023.600	23.996.602.960
		Terperiharanya sarana dan prasarana operasional Dinas dan UPTD dan terwujudnya kenyamanan & pelayanan kepada	67,00%	67,50%	68,50%	69,00%	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas, 6. Balai PSDA Wilayah Sungai, dan Balai Pusat Data dan Informasi SIDA	Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	1.515.166.375	4.048.984.250	6.433.432.626	7.657.752.700

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Program	Kegiatan	Aktivitas	Target Keuangan			
			Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV				Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV
1	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pengelola sumber daya air dan tercapainya peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan infrastruktur irigasi	3 Partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya air	4 Tahunan	5 Tahunan	6 Tahunan	7 Tahunan	8 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	9 1. Pengelolaan Jaringan Irigasi pada 6 Wilayah Sungai 2. Perencanaan Detail Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Jawa Barat 3. Pengelolaan Jaringan Irigasi Terpadu Lintas Kewenangan Pemerintah	10 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Penyusunan Dokumen Desain Rehabilitasi Jaringan Irigasi Penyusunan dokumen masterplan pengelolaan jaringan irigasi terpadu lintas kewenangan provinsi	11 145.100.000	12 752.500.000	13 2.436.700.000	14 2.390.788.840
										1.995.000	131.499.000	142.500.000	142.500.000
							Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	1. Perencanaan Umum Sumber Daya Air Bidang Sungai, danau, dan Sumber Air Lainnya di Jawa Barat	Penyusunan dokumen Masterplan Penyelidikan Air Baku di Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan	12.400.000	477.750.000	1.271.550.000	1.900.000.000
								2. Survei Investigasi Rekayasa Teknik SDA	Penyusunan dokumen hasil survey Investigasi rekayasa teknik sumber daya air	6.550.000	121.550.000	456.750.000	452.094.000
								3. Dewan SDA Provinsi Jawa Barat	Pelaksanaan kegiatan Dewan SDA	36.107.500	68.137.500	126.075.000	142.500.000
								4. WISMP-2 dan Pendamping Hibah APBD Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat	Pelaksanaan Kegiatan WISMP Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat	1.230.098.000	2.150.014.000	3.336.414.000	3.376.314.000
								5. WISMP-2 dan Pendamping Hibah APBD Badan PSDA WS Cisadane-Cibarese	Pelaksanaan Kegiatan WISMP Balai PSDA WS Cisadane-Cibarese	426.888.200	2.134.341.000	3.841.813.800	4.268.682.000
							Penyusunan Jasa Konstruksi	1. Supervisi Konstruksi Hidang Sumber Daya Air	Supervisi Konstruksi Sumber Daya Air	220.400.000	3.001.400.000	3.245.451.450	2.933.116.290

No.	Saaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Program	Kegiatan	Aktivitas	Target Keuangan			
			Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV				Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV
			4	5	6	7				11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Prosentase pengelola sumber daya air dan irigasi yang mengikuti Unklur	1,28%	1,28%	1,67%	2,00%	Pembinaan Jasa Konstruksi	1. Pembinaan Pelaksana dan Monitoring Kegiatan Konstruksi Di Jawa Barat	Pembinaan Konstruksi SIDA Irigasi SIDA	83.900.000	192.000.000	255.500.000	287.500.000
		Terpenuhinya kebutuhan dasar kesejahteraan dan meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	67,60%	67,50%	68,50%	69,00%	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawu dan Jaringan Pengairan lainnya	1. Peningkatan kapasitas Kegiatan Sumber Daya Air di Jawa barat	Pelatihan OP Irigasi	276.000.000	412.024.000	649.356.000	759.465.040
		Terpenuhinya kebutuhan dasar kesejahteraan dan meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	67,60%	67,50%	68,50%	69,00%	Program Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur	1. Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan Aparatur Daus 6 Halat PSTDA Wilayah Sragen, dan Balai Pusat Data dan Informasi SIDA	Pemenuhan kebutuhan kesejahteraan SIDA	900.734.375	1.747.818.750	2.214.401.625	2.449.163.248
		Terpenuhinya dokumen Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Barat	0 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	1. Peningkatan Lembaga Koordinasi dan Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi	Penyusunan Dokumen Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air	56.143.000	127.898.000	221.920.000	275.152.760
	Memungkainya kapasitas tampung sumber air dan pertumbuhannya infrastruktur sumber daya air yang terkait rencana alam	Bertumbuhnya Kapasitas tampung situ-situ di Wilayah Sungai Kewenangan provinsi	50.000 m ³	50.000 m ³	100.000 m ³	150.000 m ³	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	1. Pengelolaan Situ-situ pada 2 Wilayah Sungai	Pereliharaan dan Rehabilitasi Situ pada 2 WS	561.345.800	19.250.771.400	20.506.296.000	16.523.280.860
		Prosentase infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang terkait rencana alam yang berhasil direhabilitasi	100%	100%	100%	100%	Program Pengendalian Banjir dan Kekeringan Serta Penguatan Tuntutan	1. Penguatan darurat bencana Banjir dan Kekeringan di 6 Wilayah Sungai	Pengalangan darurat infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang terkena bencana	562.440.000	599.830.000	634.620.000	1.506.519.440
								2. Mekanisme Pengendalian Banjir dan Kekeringan di 6 Wilayah Sungai	Penyusunan Dokumen Potensi Banjir dan Kekeringan di 6 Wilayah Sungai	45.930.000	92.320.000	118.310.000	142.500.000
								3. Penguatan Banjir Cilacap di Kota Bawelung, Kota Depok, dan Kota Bekasi	Penyusunan Dokumen Penanganan Banjir Cilacap	7.925.000	417.350.000	700.900.000	647.211.000

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Program	Kegiatan	Aktivitas	Target Keuangan			
			Tthw I 4	Tthw II 5	Tthw III 6	Tthw IV 7				Tthw I 11	Tthw II 12	Tthw III 13	Tthw IV 14
1	2	Jumlah dan tingkat kinerja sarana dan prasarana pengendalian erosi dan sedimentasi serta perlindungan sumber air Terjaganya sempadan sumber air	0 titik	20 titik	35 titik	50 titik	Program Pengembangan, pemeliharaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	1. Perbaikan dan Pemeliharaan Sungai pada 4 (empat) Wilayah Sungai 2. Pembangunan dan pemeliharaan Mata Air DAS Cilutung	Rehabilitasi Sungai	1.144.142.000	4.223.329.000	6.663.286.000	6.423.624.500
			0 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	Program Pengembangan, pemeliharaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	1. Pengaturan Sempadan Sumber Air di Jawa Barat 2. Pengelolaan Terintegrasi DAS Cilutung, DAS Cihwang, dan DAS Cimanuk	Pemetaan Mata Air	46.450.000	1.377.412.500	2.524.100.000	2.462.368.500
									Pengukuran sempadan sungai	15.150.000	143.410.000	273.810.000	285.000.000
									Pengukuran sempadan sungai	41.470.000	248.560.000	401.110.000	475.000.000
		Tersebitnya dokumen studi dan perencanaan stu, waduk, sungai, dan bangunan penampung air lainnya	0 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	Program Pengembangan, pemeliharaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	1. Perencanaan Detail Satu Waduk dan Sungai di Jawa Barat	Penyusunan dokumen hasil desain rehabilitasi stu, waduk, sungai di Jawa Barat	135.000.000	581.650.000	1.950.400.000	1.846.297.490
		Dukungan terhadap rencana pembangunan waduk strategis	3 Waduk	3 Waduk	3 Waduk	3 Waduk	Program Pengembangan, pemeliharaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	1. Dukungan Pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang 2. Dukungan Pembangunan Waduk Cileuweng di Kabupaten Kuningun	Pelaksanaan 1m Samas	247.500.000	495.000.000	742.500.000	800.000.000
									Sharing anggaran pembetbasan lahan	60.000.000	190.500.000	5.943.000.000	5.888.191.200
									Sharing anggaran pembetbasan lahan	39.500.000	39.500.000	39.500.000	39.500.000
									Sharing anggaran pembetbasan lahan	34.500.000	34.500.000	34.500.000	34.500.000
									penyusunan Dokumen AMDAL Pembangunan Bendungan Cileuh	5.675.000	116.925.000	493.900.000	420.861.000

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Program	Kegiatan	Aktivitas	Target Keuangan			
			Tthw I	Tthw II	Tthw III	Tthw IV				Tthw I	Tthw II	Tthw III	Tthw IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Tertutupalkannya pemanfaatan situ-situ di Jawa Barat melalui - COP - Rehab	40 Situ 0 Situ	40 Situ 7 Situ	40 Situ 7 Situ	40 Situ 7 Situ	Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	1. Pengelolaan Situ-situ pada 6 Wilayah Sungai	Operasi dan Pemeliharaan Situ pada 6 WS	5.588.985.000	15.700.229.800	26.310.086.500	26.977.385.720
	Memungkainya layanan jaringan irigasi	Prosentase jaringan irigasi kewenangan provinsi dalam kondisi baik	70,04%	70,05%	71,00%	72,05%	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Ruwa dan Jaringan Pengairan lainnya	1. Pengelolaan jaringan Irigasi pada 6 Wilayah Sungai rehabilitasi jaringan irigasi pada 6 Wilayah Sungai	Operasi dan Pemeliharaan, serta rehabilitasi jaringan Irigasi	14.287.092.425	65.469.933.925	101.825.680.325	135.210.175.440
		Dukungan terhadap rencana pembangunan irigasi baru	2 (1)	2 (1)	2 (1)	2 (1)	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Ruwa dan Jaringan Pengairan lainnya	1. Dukungan Pembangunan Bendung Rengrang di Kabupaten Sumedang	Sharing anggaran pembetbessat lahan	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
		Terbangunnya Jaringan Irigasi Caringin	15,04%	30,57%	56,15%	79,40%	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Ruwa dan Jaringan Pengairan lainnya	1. Pembebasan Lahan dan Pembangunan DI Caringin di Kab Sukabumi	Pembebasan lahan dan Pembangunan Bendung	4.500.000.000	10.500.000.000	16.500.000.000	23.301.300.000
	Memungkainya sistem informasi sumber daya air yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat	Akurasi data dalam Sistem Informasi Sumber Daya Air	62%	62%	62%	62%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemantapan Informasi	1. Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air Di Jawa Barat	Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air Di Jawa Barat	8.650.000	112.300.000	253.490.000	256.270.000
							Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	1. Pengelolaan dan Analisis Data Hidrologi Jawa Barat	Pengumpulan Data Hidrologi	72.514.000	238.160.000	393.752.000	482.494.240
		Prosentase data sumber daya air yang dilayani	100%	100%	100%	100%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemantapan Teknologi Informasi	1. Pengelolaan Sistem Database dan Informasi Sumber Daya Air di Jawa Barat	Pengelolaan Sistem Database dan Informasi Sumber Daya Air	40.040.000	97.330.000	328.790.000	403.788.440
								2. Sosialisasi Pelaksanaan Pembangunan	Prosentase pembangunan bidang SDA yang diketahui masyarakat	107.585.000	193.500.000	1.646.100.000	1.464.042.200

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI TAHUN 2016
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA BARAT**



Rekapitulasi Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2016
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

No.	Kegiatan	Aktivitas	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Keuangan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. Penerbitan Saran Teknis Air Permukaan dan Pemanfaatan Pemaknaan Tanah Negara Di Jawa Barat	Pemberian rekomendasi Teknis penggunaan air permukaan, tanah negara, dan sempadan sumber air negara, dan sempadan sumber air	Prosentase pelayanan pengguna air permukaan, tanah negara, dan sempadan sumber air yang diselesaikan dalam waktu 21 hari terhitung berkas diterima dengan lengkap dan benar	100%	292.494.240,00	100%	283.287.152
2	2. Perencanaan Detail Situ, Waduk dan Sungai di Jawa Barat	Pemberian rekomendasi terhadap gambar teknis yang disetujui untuk rekomendasi teknis pengajuan SIPPA	Prosentase gambar teknis yang disetujui untuk rekomendasi teknis pengajuan SIPPA	100%	-	100%	-
3	3. Manajemen DAS pada 6 Wilayah Sungai	Penyusunan Pengelolaan Data Hidrologi dan penggunaan air permukaan dan tanah negara	Prosentase dokumen Analisa teknis yang disetujui untuk rekomendasi teknis pengajuan SIPPA	100%	5.703.388.560,00	100%	5.345.260.923
4	4. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Air Permukaan dan Tanah Negara	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air permukaan dan tanah negara	Prosentase pemanfaatan air permukaan dan tanah negara yang diawasi	100%	387.353.000,00	100%	340.563.538
5	1. Pengelolaan Jaringan Irigasi pada 6 Wilayah Sungai	Intensitas tanam oleh petani	Prosentase luas lahan sawah pada Daerah irigasi kewenangan provinsi yang terair	100%	-	100%	-
6	2. Penataan dan Pengembangan Potensi O&P Jaringan Irigasi di Jawa Barat	Pemanfaatan pelaksanaan OP Irigasi	Prosentase O&P Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah yang dipantau	100%	405.141.240,00	100%	395.121.720
7	1. Penyusunan Dokumen Sinergitas Perencanaan Sumber Daya Air.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air melalui Musrenbang dan Forum OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air	100%	374.160.000,00	100%	342.987.762
8	2. Verifikasi Bantuan Keuangan Kab/Kota di Jawa Barat	Verifikasi Bantuan Keuangan	Jumlah Dokumen Verifikasi Bantuan Keuangan	100%	190.000.000,00	100%	183.276.350
9	1. Perencanaan, Evaluasi, dan pelaporan Internal Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Dinas SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Dinas SDA	100%	150.000.000,00	100%	125.577.658

No.	Kegiatan	Aktivitas	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Keuangan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
10	1. Perencanaan Umum Sumber Daya Air Bidang Sungai, danau, dan Sumber Air Lainnya di Jawa Barat	Penyusunan Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai yang telah tersusun dan kemudian ditetaskan / disahkan	Jumlah Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai yang telah tersusun dan kemudian ditetaskan / disahkan	100%	-	100%	-
11	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas, 6 Balai PSDA Wilayah Sungai, dan Balai Pusat Data dan Informasi SDA	Pemenuhan Kebutuhan administrasi perkantoran	Prosentase kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	9.397.783.840,00	100%	8.232.028.058
12	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas, 6 Balai PSDA Wilayah Sungai, dan Balai Pusat Data dan Informasi SDA	Penginkatan sarana dan prasarana kantor	Prosentase kebutuhan sarana dan prasarana yang telah ditingkatkan	100%	23.999.602.950,00	100%	22.403.305.750
13	1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas, 6 Balai PSDA Wilayah Sungai, dan Balai Pusat Data dan Informasi SDA	Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Prosentase kebutuhan sarana dan prasarana yang telah dipelihara	100%	7.857.752.700,00	100%	7.078.529.064
14	1. Pengelolaan Jaringan Irigasi pada 6 Wilayah Sungai	Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Jumlah DI yang dipelihara	100%	-	100%	-
15	2. Perencanaan Detail Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Jawa Barat	Penyusunan Dokumen Desain Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Jumlah Dokumen Desain Rehabilitasi Jaringan Irigasi	100%	2.390.788.840,00	100%	2.383.275.944
16	3. Pengelolaan Jaringan Irigasi Terpadu Lintas Kewenangan Pemerintah	Penyusunan dokumen masterplan pengelolaan jaringan irigasi terpadu lintas kewenangan provinsi	Jumlah dokumen masterplan pengelolaan jaringan irigasi terpadu lintas kewenangan provinsi	100%	142.500.000,00	100%	130.680.588
17	1. Perencanaan Umum Sumber Daya Air Bidang Sungai, danau, dan Sumber Air Lainnya di Jawa Barat	Penyusunan dokumen Masterplan Penyediaan Air Baku di Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan	Jumlah dokumen Masterplan Penyediaan Air Baku di Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan	100%	1.900.000.000,00	100%	1.818.846.185
18	2. Survey Investigasi Rekayasa Teknik SDA	Penyusunan dokumen hasil survey investigasi rekayasa teknik sumber daya air	Jumlah dokumen hasil survey investigasi rekayasa teknik sumber daya air	100%	452.694.000,00	100%	451.413.566
19	3. Dewan SDA Provinsi Jawa Barat	Pelaksanaan kegiatan Dewan SDA	Jumlah Dokumen Kegiatan Dewan SDA	100%	142.500.000,00	100%	141.961.992
20	4. WISMP-2 dan Pendamping Hibah APBD Dinas PSDA Prov. Jawa Barat	Pelaksanaan Kegiatan WISMP Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat	Jumlah Dokumen Kegiatan WISMP Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat	100%	3.376.314.000,00	100%	2.932.911.668
21	5. WISMP-2 dan Pendamping Hibah APBD Balai PSDA W.S. Cisadea-Cibareno	pelaksanaan Kegiatan WISMP Balai PSDA W.S. Cisadea-Cibareno	Jumlah Dokumen Kegiatan WISMP Balai PSDA W.S. Cisadea-Cibareno	100%	4.268.682.000,00	100%	3.797.262.676

No.	Kegiatan	Aktivitas	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Keuangan	
							(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Supervisi Konstruksi Bidang Sumber Daya Air	Supervisi Konstruksi Sumber Daya Air	Jumlah Dokumen Supervisi Konstruksi Sumber Daya Air	100%	2.933.116.290,00	100%	2.506.493.610	
23	1. Pembinaan Pelaksanaan dan Monitoring Kegiatan Konstruksi Di Jawa Barat	Pembinaan Konstruksi SDM Bidang SDA	Jumlah pegawai yang dibina serta dokumen hasil supervisi pelaksanaan konstruksi sumber daya air dan irigasi	100%	287.500.000,00	100%	247.519.600	
24	1. Peningkatan kapasitas Kegiatan Sumber Daya Air di Jawa Barat	Pelatihan OP Irigasi	Jumlah pengelola Sumber Daya Air yang dibina dalam bidang Operasi dan pemeliharaan	100%	759.465.040,00	100%	711.163.011	
25	1. Peningkatan Kesejahteraan dan kemampuan Aparatur Dinas, 6 Balai PSDA Wilayah Sungai, dan Balai Pusat Data dan Informasi SDA	Pemenuhan kebutuhan kesejahteraan SDM	Prosentase Jumlah SDM yang terpenuhi kesejahteraan dan kemampuan aparatur	100%	2.449.163.248,00	100%	1.928.195.550	
26	1. Pemberdayaan Lembaga Koordinasi dan Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi	Penyusunan Dokumen Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air	100%	275.152.760,00	100%	201.932.632	
27	1. Pengelolaan Situ-situ pada 2 Wilayah Sungai	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Situ pada 2 WS	Jumlah situ yang direhabilitasi/ditingkatkan	100%	16.523.280.860,00	100%	16.436.156.485	
28	1. Penanganan darurat Bencana Banjir dan Kekeringan di 6 Wilayah Sungai	Penanganan darurat infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang terkena bencana	prosentase penanganan darurat infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang terkena bencana	100%	1.906.519.440,00	100%	1.823.767.560	
29	2. Dukungan Pengendalian Banjir dan Kekeringan di 6 Wilayah Sungai	Penyusunan Dokumen Potensi Banjir dan Kekeringan di 6 Wilayah Sungai	Jumlah Dokumen Potensi Banjir dan Kekeringan di 6 Wilayah Sungai	100%	142.500.000,00	100%	141.467.840	
30	3. Penanganan Banjir Cilencang di Kota Bandung, Kota Depok, dan Kota Bekasi	Penyusunan Dokumen Penanganan Banjir Cilencang	Jumlah Dokumen Penanganan Banjir Cilencang	100%	647.211.000,00	100%	645.579.343	
31	1. Perbaikan dan Pemeliharaan Sungai pada 4 (empat) Wilayah Sungai	Rehabilitasi Sungai	Jumlah Sungai yang direhabilitasi untuk meminimalisir daya rusak air	100%	6.423.824.500,00	100%	3.861.184.566	
32	2. Pembangunan dan pengamanan Mata Air DAS Citarum	Penataan Mata Air	Jumlah mata air yang berhasil dirata dan diamankan	100%	2.452.369.500,00	100%	2.389.471.000	
33	1. Pengaturan Sempadan Sumber Air di Jawa Barat	Pengukuran sempadan sungai	Jumlah Sempadan Sumber Air yang diukur	100%	285.000.000,00	100%	229.767.725	
34	2. Pengelolaan Terintegrasi DAS Citarum, DAS Ciliwung, dan DAS Cimanuk	Pengukuran sempadan sungai	Jumlah Sempadan Sumber Air yang diukur	100%	475.000.000,00	100%	432.351.233	

No.	Kegiatan	Aktivitas	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Keuangan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
35	1. Perencanaan Detail Situ, Waduk dan Sungai di Jawa Barat.	Penyusunan dokumen hasil desain rehabilitasi situ, waduk, sungai di Jawa Barat	Jumlah dokumen hasil desain rehabilitasi situ, waduk, sungai di Jawa Barat	100%	1.846.297.480,00	100%	1.811.401.552
36	1. Dukungan Pembangunan Waduk Jatugede di Kabupaten Sumedang	Pelaksanaan Tim Samsat	Dokumen sharing anggaran	100%	800.000.000,00	100%	517.287.000
37	2. Dukungan Pembangunan Waduk Cileuweung di Kabupaten Kurungan	Sharing anggaran pembebasan lahan	Dokumen sharing anggaran pembebasan lahan	100%	5.888.191.200,00	100%	5.731.792.700
38	3. Dukungan pembangunan Waduk Sadawarna di Kab. Subang	Sharing anggaran pembebasan lahan	Jumlah Dokumen Sharing Anggaran Pembebasan Lahan	100%	39.500.000,00	100%	11.450.000
39	4. Dukungan Pembangunan Waduk Leuwikeris di Kab. Cianjur	Sharing anggaran pembebasan lahan	Jumlah Dokumen Sharing Anggaran Pembebasan Lahan	100%	34.500.000,00	100%	34.500.000
40	5. CI.TH PPK AMDAL Pembangunan Bendungan Ciletuh	penyusunan Dokumen AMDAL	Jumlah Dokumen AMDAL	100%	420.861.000,00	100%	416.882.800
41	1. Pengelolaan Situ-situ pada 6 Wilayah Sungai	Pembangunan Bendungan Ciletuh Operasi dan Pemeliharaan Situ pada 6 WS	Pembangunan Bendungan Ciletuh Jumlah Situ yang ditangani	100%	26.977.345.720,00	100%	25.797.229.690
42	1. Pengelolaan jaringan Irigasi pada 6 Wilayah Sungai dan rehabilitasi jaringan irigasi pada 6 Wilayah Sungai	Operasi dan Pemeliharaan, serta rehabilitasi jaringan Irigasi	Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi	100%	135.210.175.440,00	100%	127.355.943.716
43	1. Dukungan Pembangunan Bendung Rengrang di Kabupaten Sumedang	Sharing anggaran pembebasan lahan	Dokumen Sharing Anggaran Pembebasan Lahan	100%	45.000.000,00	100%	45.000.000
44	1. Pembebasan Lahan dan Pembangunan DI. Caringin di Kab. Sukabumi	Pembebasan lahan dan Pembangunan Bendung	Pembangunan DI Caringin	100%	23.301.300.000,00	4,57%	1.064.024.332
45	1. Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air Di Jawa Barat	Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air Di Jawa Barat	Tingkat keakuratan data dalam Sistem Informasi Sumber Daya Air	100%	256.270.000,00	100%	249.757.000
46	1. Pengelolaan dan Analisis Data Hidrologi Jawa Barat	Pengumpulan Data Hidrologi	Akurasi Data Hidrologi di Jawa Barat	100%	482.494.240,00	100%	435.736.760
47	1. Pengelolaan Sistem Database dan Informasi Sumber Daya Air di Jawa Barat	Pengelolaan Sistem Database dan Informasi Sumber Daya Air	prosentase data Sumber Daya Air yang dilayani	100%	403.788.440,00	100%	315.418.960
48	2. Sosialisasi Pelaksanaan Pembangunan	Prosentase pembangunan bidang SDA yang diketahui masyarakat	Prosentase pembangunan bidang SDA yang diketahui masyarakat	100%	1.464.042.200,00	100%	1.307.401.554



Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2016
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja				Program	Kegiatan	Aktivitas	% Capaian Keuangan			
			Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV				Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air	Prosentase rekomendasi teknis pengajuan SIPPA yang disediakan tepat waktu	41%	49%	77%	100%	Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	1. Penerbitan Saran Teknis Air Permukaan dan Pemanfaatan Pemakaian Tanah Negara Di Jawa Barat.	Pemberian rekomendasi Teknis penggunaan air permukaan, tanah negara, dan sempa-dan sumber air	67,21	88,43	98,31	96,85
								2. Perencanaan Detail Situ, Waduk dan Sungai di Jawa Barat.	Pemberian rekomendasi terhadap gambar teknis yang disetujui untuk rekomendasi teknis pengajuan SIPPA.	-	-	-	-
								3. Manajemen DAS pada 6 Wilayah Sungai	Penyusunan Pengelolaan Data Hidrologi dan penggunaan air permukaan dan tanah negara	37,26	77,30	79,61	93,72
								4. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Air Permukaan dan Tanah Negara	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ar permukaan dan tanah negara	57,01	56,40	60,48	87,92

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja							Program	Kegiatan	Aktivitas	% Capaian Keuangan									
			Triw I				Triw II						Triw III			Triw IV			Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV
			4	5	6	7	5	6	7				8	9	10	11	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
		Prosentase Intensitas Tanam pada daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang terair dalam 3 musim tanam	50%	50%	100%	100%	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	1. Pengelolaan Jaringan Irigasi pada 6 Wilayah Sungai 2. Pemantauan dan Pengembangan Potensi O&P Jaringan Irigasi di Jawa Barat	Intensitas tanam oleh petani Pemantauan pelaksanaan OP Irigasi	-	-	-	-									
		Tersusunnya dokumen perencanaan dalam 1 tahun	100	100	100	100	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan Pembangunan Daerah	1. Penyusunan Dokumen Sinergitas Perencanaan Sumber Daya Air	Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air melalui Musrenbang dan Forum OPD	64,82	81,57	91,80	91,67									
		Tersusunnya dokumen evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan dalam 1 tahun	100	100	100	100	Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	2. Verifikasi Bantuan Keuangan Kab/Kota di Jawa Barat	Verifikasi Bantuan Keuangan	54,76	63,91	58,19	96,46									
		Tersedianya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai yang telah tersusun dan kemudian ditetapkan / disahkan	100%	100%	100%	100%	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	1. Perencanaan, Evaluasi, dan pelaporan Internal Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Dinas SDA	66,88	69,11	61,27	83,72									
								1. Perencanaan Umum Sumber Daya Air Bidang Sungai, danau, dan Sumber Air Lainnya di Jawa Barat.	Penyusunan Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai yang telah tersusun dan kemudian ditetapkan / disahkan	-	-	-	-									

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja				Program	Kegiatan	Aktivitas	% Capaian Keuangan			
			Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV				Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV
			4	5	6	7				11	12	13	14
1	2	3	100%	100%	100%	100%	8	9	10	65,04	82,54	82,73	87,60
		Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja mendukung tupoksinya, dan terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat serta terlaksananya pembenahan sistem, prosedur, dan standarisasi kualitas pelayanan publik					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas, 6 Balai PSDA Wilayah Sungai, dan Balai Pusat Data dan Informasi SDA	Pemenuhan Kebutuhan administrasi perkantoran				
		Meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas, 6 Balai PSDA Wilayah Sungai, dan Balai Pusat Data dan Informasi SDA	Peningkatan sarana dan prasarana kantor	4,18	9,46	31,02	93,35
		Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional Dinas dan UPTD dan terwujudnya kenyamanan & pelayanan kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas, 6 Balai PSDA Wilayah Sungai, dan Balai Pusat Data dan Informasi SDA	Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	21,27	36,45	50,17	90,08

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja				Program	Kegiatan	Aktivitas	% Capaian Keuangan			
			Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV				Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV
			4	5	6	7				11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Meningkatnya kapasitas sumber pengelola sumber daya air dan terciptanya peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan infrastruktur irigasi	Partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya air	100%	100%	100%	100%	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	1. Pengelolaan Jaringan Irigasi pada 6 Wilayah Sungai 2. Perencanaan Detail Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Jawa Barat.	Penyusunan Dokumen Desain Rehabilitasi Jaringan Irigasi	42,83	24,15	36,79	99,69
							3. Pengelolaan Jaringan Irigasi Terpadu Lintas Kewenangan Pemerintah		Penyusunan dokumen masterplan pengelolaan jaringan irigasi terpadu lintas kewenangan provinsi	0,00	6,08	15,07	91,71
							Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	1. Perencanaan Umum Sumber Daya Air Bidang Sungai, danau, dan Sumber Air Lainnya di Jawa Barat	Penyusunan dokumen Masterplan Penyediaan Air Baku di Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan	0,00	82,99	87,23	95,73
								2. Survey Investigasi Rekayasa Teknik SDA	Penyusunan dokumen hasil survey investigasi rekayasa teknik sumber daya air	81,22	10,65	42,07	99,85
								3. Dewan SDA Provinsi Jawa Barat	Pelaksanaan kegiatan Dewan SDA	43,86	74,43	79,42	99,62
								4. WISMP-2 dan Pendamping Hibah APBD Dinas PSDA Prov. Jawa Barat	Pelaksanaan Kegiatan WISMP Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat	11,36	83,05	77,05	86,87
								5. WISMP-2 dan Pendamping Hibah APBD Balai PSDA WS. Cisadea-Cibareno	pelaksanaan Kegiatan WISMP Balai PSDA WS Cisadea-Cibareno	6,82	11,36	74,29	88,96
							2. Supervisi Konstruksi Bidang Sumber Daya Air	2. Supervisi Konstruksi	Supervisi Konstruksi Sumber Daya Air	14,05	9,11	17,37	85,45

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja				Program	Kegiatan	Aktivitas	% Capaian Keuangan			
			Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV				Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV
			4	5	6	7				11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Prosentase pengelola sumber daya air dan irigasi yang mengikuti Diklat	64,00%	64,00%	80,83%	100%	Pembinaan Jasa Kontruksi	1. Pembinaan Pelaksanaan dan Monitoring Kegiatan Konstruksi Di Jawa Barat	Pembinaan Konstruksi SDM Bidang SDA	35,91	32,81	36,54	86,09
							Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	1. Peningkatan kapasitas Kegiatan Sumber Daya Air di Jawa barat	Pelatihan OP Irigasi	18,40	96,56	84,39	93,64
		Terpenuhinya kebutuhan dasar kesejahteraan dan meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	100%	100%	Program Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur	1. Peningkatan Kesejahteraan dan kemampuan Aparatur Dinas, 6 Balai PSDA Wilayah Sungai, dan Balai Pusat Data dan Informasi SDA	Pemenuhan kebutuhan kesejahteraan SDM	11,56	29,93	50,54	78,65
		Tersusunnya dokumen Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Barat	100%	100%	100%	100%	Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	1. Pemberdayaan Lembaga Koordinasi dan Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi	Penyusunan Dokumen Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air	39,94	49,49	41,55	73,39

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja				Program	Kegiatan	Aktivitas	% Capaian Keuangan			
			Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV				Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	33%	38,48%	67,42%	354,93%	Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	1. Pengelolaan Situ-situ pada 2 Wilayah Sungai	Peneliharaan dan Rehabilitasi Situ pada 2 WS	55,06	14,79	49,25	99,47
3	Meningkatnya kapasitas tampung sumber air dan berfungsi infrastruktur sumber daya air yang terkena bencana alam	Bertambahnya Kapasitas tampung situ-situ di Wilayah Sungai kewenangan provinsi											
		Prosentase infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang terkena bencana alam yang berhasil direhabilitasi	100%	100%	100%	100%	Program Pengendalian Banjir dan Kekeringan Serta Pengamanan Pantai	1. Penanganan darurat Bencana Banjir dan Kekeringan di 6 Wilayah Sungai	penanganan darurat infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang terkena bencana	10,75	200,30	262,18	95,66
								2. Dukungan Pengendalian Banjir dan Kekeringan di 6 Wilayah Sungai	Penyusunan Dokumen Potensi Banjir dan Kekeringan di 6 Wilayah Sungai	34,13	57,12	78,89	99,28
								3. Penanganan Banjir Cilencang di Kota Bandung, Kota Depok, dan Kota Bekasi	Penyusunan Dokumen Penanganan Banjir Cilencang	100,00	3,76	24,79	99,75
		Jumlah dan tingkat kinerja sarana dan prasarana pengendali erosi dan sedimentasi serta perlindungan sumber air	100%	21%	30%	38,93%	Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	1. Perbaikan dan Pemeliharaan Sungai pada 4 (empat) Wilayah Sungai	Rehabilitasi Sungai	4,27	29,88	27,90	60,11
								2. Pembangunan dan pengamanan Mata Air DAS Citarum	Penataan Mata Air	99,25	6,69	47,34	97,44

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja				Program	Kegiatan	Aktivitas	% Capaian Keuangan			
			Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV				Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV
			4	5	6	7				11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Terjaganya sempadan sumber air	100%	100%	100%	100%	Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	1. Pengaturan Sempadan Sumber Air di Jawa Barat 2. Pengelolaan Terintegrasi DAS Citarum, DAS Ciliwung, dan DAS Cimanuk	Pengukuran sempadan sungai Pengukuran sempadan sungai	0,00	51,41	51,99	80,62
		Tersedianya dokumen studi dan perencanaan situ, waduk, sungai, dan bangunan penampung air lainnya	100%	100%	100%	100%	Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	1. Perencanaan Detail Situ, Waduk dan Sungai di Jawa Barat.	Penyusunan dokumen hasil desain rehabilitasi situ, waduk, sungai di Jawa Barat	25,45	25,64	35,79	98,11
		Dukungan terhadap rencana pembangunan waduk strategis	100%	100%	100%	100%	Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	1. Dukungan Pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang 2. Dukungan Pembangunan Waduk Cileuweung di Kabupaten Kuningan 3. Dukungan pembangunan Waduk Sadawarna di kab Subang 4. Dukungan Pembangunan Waduk Leuwikeris di Kab. Cianjur 5. CLTH PPK AMDAL Pembangunan Bendungan Ciletuh	Pelaksanaan Tim Samsat Sharing anggaran penbebasan lahan Sharing anggaran penbebasan lahan Sharing anggaran penbebasan lahan	41,18	58,87	50,81	64,66
										59,36	2944,59	95,34	97,34
										28,99	28,99	28,99	28,99
										71,86	100,00	100,00	100,00
										100,00	21,68	28,87	99,05

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja				Program	Kegiatan	Aktivitas	% Capaian Keuangan			
			Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV				Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Teroptimalkannya pemanfaatan situ-situ di Jawa Barat melalui - OP - Rehab	100 100	100 128,57%	100 128,57%	100 128,57%	Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	I. Pengelolaan Situ-situ pada 6 Wilayah Sungai	Operasi dan Pemeliharaan Situ pada 6 WS	20,42	32,40	37,20	95,63
4	Meningkatnya luas layanan jaringan irigasi	Prosentase jaringan irigasi kewenangan provinsi dalam kondisi baik	97,15%	97,15%	97,63%	100,00%	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	I. Pengelolaan jaringan Irigasi pada 6 Wilayah Sungai dan rehabilitasi jaringan irigasi pada 6 Wilayah Sungai	Operasi dan Pemeliharaan, serta rehabilitasi jaringan Irigasi	60,12	58,54	77,71	94,19
		Dukungan terhadap rencana pembangunan irigasi baru	100	100	100	100	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	I. Dukungan Pembangunan Bendung Rengrang di Kabupaten Sumedang	Sharing anggaran pembebasan lahan	76,44	80,89	100,00	100,00
		Terbangunnya Jaringan Irigasi Caringin	0,25%	1,24%	3,45%	4,57%	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	I. Pembebasan Lahan dan Pembangunan DI. Caringin di Kab. Sukabumi	Pembebasan lahan dan Pembangunan Bendung	1,39	1,39	3,23	4,57

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja				Program	Kegiatan	Aktivitas	% Capaian Keuangan			
			Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV				Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Meningkatnya sistem informasi sumber daya air yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat	Akurasi data dalam Sistem Informasi Sumber Daya Air	100%	100%	100%	100%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	1. Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air Di Jawa Barat	Pengelolaan Informasi Sumber Daya Air Di Jawa Barat	92,95	99,29	71,83	97,46
							Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	1. Pengelolaan dan Analisis Data Hidrologi Jawa Barat	Pengumpulan Data Hidrologi	82,78	62,02	63,76	90,31
		Prosentase data sumber daya air yang dilayani	100%	100%	100%	100%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	1. Pengelolaan Sistem Database dan Informasi Sumber Daya Air di Jawa Barat	Pengelolaan Sistem Database dan Informasi Sumber Daya Air	50,80	86,73	43,23	78,11
								2. Sosialisasi Pelaksanaan Pembangunan	Prosentase pembangunan bidang SDA yang diketahui masyarakat	46,26	87,00	31,93	89,30

CASCADE PK DAN POHON KINERJA TAHUN 2016
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA BARAT

POHON KINERJA

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016

Misi 4 :

Mewujudkan Jawa Barat yang Aman dengan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan

Tujuan 2 :

Meningkatkan keterpaduan infrastruktur untuk peningkatan produktivitas ekonomi, dan pelayanan dasar

Indikator :

Tingkat Kondisi Baki Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi

Strategi :

Meningkatkan kondisi Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dan Irigasi untuk konservasi, pendayagunaan SDA serta Pengendalian Daya Rusak Air

Kebijakan 1 :
Pemerintah kebutuhan pokok penduduk akan air dan menunjang penyediaan kebutuhan pangan

Sasaran 1 :
Meningkatnya Penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air

Indikator 1 :
Presentase Rekomendasi Teknik Pengisian SDA yang dilaksanakan tepat waktu

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air
(Rp. 6.343.235.800)

Indikator 2 :
Presentase Intensitas Tanam pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang terdiri dalam 3 Musim Tanam

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengaliran Lainnya
(Rp. 405.141.240)

Sasaran 2 :
Meningkatnya Kapasitas Tampung Sumber Air dan Berfungsinya Infrastruktur Sumber Daya Air yang terdapat Bencana Alam

Indikator 3 :
Bertumbuhnya Kapasitas Tampung Situ-Situ di WS Kewenangan Provinsi

Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
(Rp. 16.523.280.860)

Indikator 4 :
Presentase Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi yang terdapat Bencana Alam yang berhasil dikeajaibkapi

Program Pengendalian Banjir dan Kekerangan serta Pengamanan Pantai
(Rp. 2.696.230.440)

Sasaran 3 :
Meningkatnya Luas Layanan Jaringan Irigasi

Indikator 5 :
Presentase Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi dalam Kondisi Baik

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengaliran Lainnya
(Rp. 135.210.775.440)

Kebijakan 3 :
Peningkatan Pendayagunaan Sumber Daya Air

Kebijakan 4 :
Peningkatan Kualitas SDA dan Peningkatan Peran Masyarakat, Swasta dan Pemerintah

Sasaran 4 :
Meningkatnya Partisipasi Sumber Daya Manusia dan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air dan Infrastruktur Irigasi

Indikator 6 :
Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pengelolaan Sumber Daya Air

Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
(Rp. 10.139.590.000)

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengaliran Lainnya
(Rp. 2.533.288.840)

Program Pembinaan Jasa Konsultansi
(Rp. 2.933.116.290)

Indikator 7 :
Presentase Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi yang Mengikuti Oribat

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengaliran Lainnya
(Rp. 759.465.040)

Program Pembinaan Jasa Konstruksi
(Rp. 287.500.000)

Sasaran 5 :
Meningkatnya Sistem Informasi Sumber Daya Air yang Terintegrasi dan Mudah Diakses oleh Masyarakat

Indikator 8 :
Akurasi Data dalam Sistem Informasi Sumber Daya Air

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
(Rp. 256.270.000)

Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
(Rp. 462.454.240)

Indikator 9 :
Presentase Data Sumber Daya Air yang Diyakini

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
(Rp. 1.867.830.640)

POHON KINERJA TAHUN 2017
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN - IV

**PIAGAM PENGHARGAAN TAHUN 2016
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA BARAT**



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 957/KPTS/M/2016
TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA PEMILIHAN PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN
JARINGAN IRIGASI DAN RAWA TELADAN TINGKAT NASIONAL UNTUK UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH/PENGAMAT, JURU/MANTRI PENGAIRAN, KOMUNITAS PEDULI SUNGAI
TINGKAT NASIONAL, PETUGAS UNIT PENGELOLA BENDUNGAN, SERTA PETUGAS
OPERASI DAN PEMELIHARAAN BENDUNGAN TELADAN
TINGKAT NASIONAL TAHUN 2016

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya lomba pemilihan Petugas Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa Teladan Tingkat Nasional Tahun 2016, perlu diberikan tanda penghargaan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah/Pengamat, Juru/Mantri Pengairan, Komunitas Peduli Sungai Tingkat Nasional, Petugas Unit Pengelola Bendungan, Serta Petugas Operasi Dan Pemeliharaan Bendungan;
- b. bahwa para petugas yang nama unit pelaksana teknis daerah/pengamat, nama juru/mantri pengairan, nama komunitas peduli sungai tingkat nasional, nama petugas unit pengelola bendungan, dan nama petugas operasi dan pemeliharaan bendungan serta jabatannya masing-masing dipandang berhak untuk menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Pemenang Lomba Pemilihan Petugas Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dan Rawa Teladan Tingkat Nasional Untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah/Pengamat, Juru/Mantri Pengairan, Komunitas Peduli Sungai Tingkat Nasional, Petugas Unit Pengelola Bendungan, Serta Petugas Operasi Dan Pemeliharaan Bendungan Teladan Tingkat Nasional Tahun 2016;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah Dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 725);
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 537);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1421);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1034);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

771);

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2015 tentang Rawa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 797);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817);

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor 05/SE/D/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sungai Serta Pemeliharaan Sungai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA PEMILIHAN PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI DAN RAWA TELADAN TINGKAT NASIONAL UNTUK UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH/PENGAMAT, JURU/MANTRI PENCAIRAN, KOMUNITAS PEDULI SUNGAI TINGKAT NASIONAL, PETUGAS UNIT PENGELOLA BENDUNGAN, SERTA PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN BENDUNGAN TELADAN TINGKAT NASIONAL TAHUN 2016.

KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Pemilihan Petugas Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dan Rawa Teladan Tingkat Nasional Tahun 2016 untuk:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah/Pengamat Irigasi Kelompok I yang nama, jabatan, daerah irigasi, provinsi/kabupatennya tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini guna mendapatkan kedudukan sebagai pemenang I, pemenang II, pemenang III, harapan I, dan harapan II;

2. Unit Pelaksana Teknis Daerah/Pengamat Irigasi Kelompok II yang nama, jabatan, daerah irigasi, provinsi/kabupatennya tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini guna mendapatkan kedudukan sebagai pemenang I, pemenang II, pemenang III, harapan I, dan harapan II;
3. Juru/Mantri Irigasi Kelompok I yang nama, jabatan, daerah irigasi, provinsi/kabupatennya tercantum dalam Lampiran III Keputusan Menteri ini guna mendapatkan kedudukan sebagai pemenang I, pemenang II, pemenang III, harapan I, dan harapan II;
4. Juru/Mantri Irigasi Kelompok II yang nama, jabatan, daerah irigasi, provinsi/kabupatennya tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Menteri ini guna mendapatkan kedudukan sebagai pemenang I, pemenang II, pemenang III, harapan I, dan harapan II;
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah/Pengamat Rawa yang nama, jabatan, daerah irigasi, provinsi/kabupatennya tercantum dalam Lampiran V Keputusan Menteri ini guna mendapatkan kedudukan sebagai pemenang I, pemenang II, pemenang III, harapan I, dan harapan II;
6. Juru/Mantri Rawa yang nama, jabatan, daerah irigasi, provinsi/kabupatennya tercantum dalam Lampiran VI Keputusan Menteri ini guna mendapatkan kedudukan sebagai pemenang I, pemenang II, pemenang III, harapan I, dan harapan II;
7. Komunitas Peduli Sungai yang nama komunitas dan provinsinya tercantum dalam Lampiran VII Keputusan Menteri ini guna mendapatkan kedudukan sebagai pemenang I, pemenang II, pemenang III, harapan I, harapan II, dan harapan III; dan
8. Petugas Unit Pengelola Bendungan yang nama unit pengelola bendungannya tercantum dalam Lampiran VIII Keputusan Menteri ini guna mendapatkan kedudukan sebagai pemenang I, pemenang II, dan pemenang III;

9. Petugas Operasi dan Pemeliharaan Bendungan dengan volume di atas 20 (dua puluh) juta m³ yang nama, bendungan, dan balainya tercantum dalam Lampiran IX Keputusan Menteri ini guna mendapatkan kedudukan sebagai pemenang I, pemenang II, dan pemenang III;
10. Petugas Operasi dan Pemeliharaan Bendungan dengan volume antara 2 (dua) juta m³ - 20 juta m³ yang nama, bendungan, dan balainya tercantum dalam Lampiran X Keputusan Menteri ini guna mendapatkan kedudukan sebagai pemenang I, pemenang II, dan pemenang III; dan
11. Petugas Operasi dan Pemeliharaan Bendungan dengan volume di bawah 2 (dua) juta m³ yang nama, bendungan, dan balainya tercantum dalam Lampiran XI Keputusan Menteri ini guna mendapatkan kedudukan sebagai pemenang I, pemenang II, dan pemenang III.

KEDUA : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Gubernur Provinsi Papua;
4. Gubernur Provinsi Maluku;
5. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara;
6. Gubernur Provinsi Gorontalo;
7. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;
8. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara;

9. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat;
10. Gubernur Provinsi Bali;
11. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan;
12. Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
14. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
15. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
16. Gubernur Provinsi Lampung;
17. Gubernur Provinsi Riau;
18. Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
19. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan;
20. Bupati Merauke, Provinsi Papua;
21. Bupati Nabire, Provinsi Papua;
22. Bupati Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
23. Bupati Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara;
24. Bupati Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
25. Bupati Luwuk, Provinsi Sulawesi Tengah;
26. Bupati Poso, Provinsi Sulawesi Tengah;
27. Bupati Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah;
28. Bupati Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara;
29. Bupati Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara;
30. Bupati Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
31. Bupati Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
32. Bupati Gianyar, Provinsi Bali;
33. Bupati Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
34. Bupati Bondowoso, Provinsi Jawa Timur;
35. Bupati Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
36. Bupati Purworejo, Provinsi Jawa Tengah;
37. Bupati Kuningan, Provinsi Jawa Barat;
38. Bupati Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
39. Bupati Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
40. Bupati Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
41. Bupati Kuantan Singingi, Provinsi Riau;
42. Bupati Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

43. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
44. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang;
45. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas;
46. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo;
47. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak;
48. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana;
49. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy;
50. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum;
51. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung;
52. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung;
53. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII;
54. Kepala Balai Wilayah Sungai Papua;
55. Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku;
56. Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi I;
57. Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi II;
58. Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III;
59. Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV;
60. Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II;
61. Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan III;
62. Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I;
63. Kepala Balai Wilayah Sungai Bali Penida;
64. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III;
65. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V;

Ditetapkan di Jakarta

tanggal 24 November 2016

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR : 957/KPTS/M/2016

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA PEMILIHAN
PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN
JARINGAN IRIGASI DAN RAWA TELADAN
TINGKAT NASIONAL UNTUK UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH/PENGAMAT, JURU/MANTRI
PENGAIRAN, KOMUNITAS PEDULI SUNGAI
TINGKAT NASIONAL, PETUGAS UNIT PENGELOLA
BENDUNGAN, SERTA PETUGAS OPERASI DAN
PEMELIHARAAN BENDUNGAN TELADAN
TINGKAT NASIONAL TAHUN 2016

NO.	NAMA UPTD/PENGAMAT IRIGASI (KELOMPOK I)	JABATAN	DAERAH IRIGASI	PROVINSI/ KABUPATEN	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5	6
1	Drs. Setia Budi Prayitno, MM, MT	Kepala UPTD Pengairan Adiwerna	D.I. Gung	Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Tegal	Pemenang I
2	Ida Sulyaningsih, SE	Pengamat Pengairan Wilayah Kediri	D.I. Pengga, Batu Riti, Datar, Gebong, Buntopeng, Pesonggoran Kuripan, Relangan	Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat	Pemenang II
3	Jumaedi	Pengamat Petangolemba	D.I. Panjo	Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Poso	Pemenang III
4	Sutopo	Kepala UPTD Bandar Mataram	D.I. Way Seputih	Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah	Harapan I

NO.	NAMA UPTD/PENGAMAT IRIGASI [KELOMPOK I]	JABATAN	DAERAH IRIGASI	PROVINSI/ KABUPATEN	KEDUDUKAN
5	Narsan, ST	Kepala Sub Unit Pelayanan Kuningan	D.I. Cipager	Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cirebon	Harapan II

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



[Signature]
BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

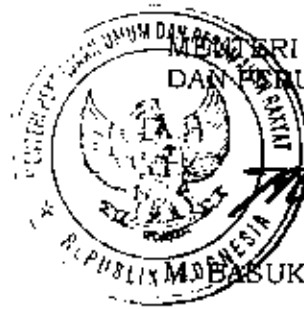
NOMOR : 957/KPTS/M/2016

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA PEMILIHAN
PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN
JARINGAN IRIGASI DAN RAWA TELADAN
TINGKAT NASIONAL UNTUK UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH/PENGAMAT, JURU/MANTRI
PENGAIRAN, KOMUNITAS PEDULI SUNGAI
TINGKAT NASIONAL, PETUGAS UNIT PENGELOLA
BENDUNGAN, SERTA PETUGAS OPERASI DAN
PEMELIHARAAN BENDUNGAN TELADAN
TINGKAT NASIONAL TAHUN 2016

NO.	NAMA UPTD/PENGAMAT IRIGASI (KELOMPOK II)	JABATAN	DAERAH IRIGASI	PROVINSI/ KABUPATEN	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5	6
1	I Komang Puger	Pengamat Daerah Irigasi Kosinggolan	D.I. Kosinggolan	Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow	Pemenang I
2	Suhadi	Pengamat Pengairan UPT Wilayah III	D.I. Galogandang	Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Tanah Datar	Pemenang II
3	Sugiarto, Nr, ST	Pengamat Pengairan Ladongi	D.I. Ladongi	Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka Timur	Pemenang III
4	Adrian Kale, SE	Pengamat Pengairan Wilayah 02 Limboto	D.I. Alo, Molalahu, Pohu, Hulu- Dupitango	Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo	Harapan I

NO.	NAMA UPTD/PENGAMAT IRIGASI (KELOMPOK II)	JABATAN	DAERAH IRIGASI	PROVINSI/ KABUPATEN	KEDUDUKAN
5	Rudy Amyus, ST	Pengamat Wilayah III	D.I. Simandolak	Provinsi Riau, Kabupaten Kuantan Singingi	Harapan II



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA PEMILIHAN
PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN

JARINGAN IRIGASI DAN RAWA TELADAN

TINGKAT NASIONAL UNTUK UNIT PELAKSANA

TEKNIS DAERAH/PENGAMAT, JURU/MANTRI

PENGAIRAN, KOMUNITAS PEDULI SUNGAI

TINGKAT NASIONAL, PETUGAS UNIT PENGELOLA



BENDUNGAN, SERTA PETUGAS OPERASI DAN

PEMELIHARAAN BENDUNGAN TELADAN

TINGKAT NASIONAL TAHUN 2016

NO.	NAMA JURU/MANTRI IRIGASI (KELOMPOK I)	JABATAN	DAERAH IRIGASI	PROVINSI/ KABUPATEN	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5	6
1	Rohamin	Juru Pengairan Pakisan	D.I. Pakisan, Sumber Mas 1,2,3	Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso	Pemenang I
2	Sudihardja	Juru Pengairan Pituruh II	D.I. Kedung Gupit Wetan, Pamriyan, Petung Tanah Putih	Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo	Pemenang II
3	Sumardi	Juru Pengairan Sentral Sari	D.I. Singkoyo	Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Luwuk	Pemenang III
4	Aros Saprudin	Juru Pengairan Cimarinjung	D.I. Cimarinjung	Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi	Harapan I

NO.	NAMA JURU/MANTRI IRIGASI (KELOMPOK I)	JABATAN	DAERAH IRIGASI	PROVINSI/ KABUPATEN	KEDUDUKAN
5	Amat Sobari	Mantri 3 UPTD Rukti Endah	D.I. Sekampung Sistem	Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah	Harapan II


MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

SUKIR HADIMULJONO

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT



NOMOR : 957/KPTS/M/2016

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA PEMILIHAN
PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN
JARINGAN IRIGASI DAN RAWA TELADAN
TINGKAT NASIONAL UNTUK UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH/PENGAMAT, JURU/MANTRI
PENGAIRAN, KOMUNITAS PEDULI SUNGAI
TINGKAT NASIONAL, PETUGAS UNIT PENGELOLA
BENDUNGAN, SERTA PETUGAS OPERASI DAN
PEMELIHARAAN BENDUNGAN TELADAN
TINGKAT NASIONAL TAHUN 2016

NO.	NAMA JURU/MANTRI IRIGASI (KELOMPOK II)	JABATAN	DAERAH IRIGASI	PROVINSI/ KABUPATEN	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5	6
1	Harmanto	Juru Pengairan D.I. Samal	D.I. Samal	Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah	Pemenang I
2	M. Wardul Fahri, S.Adm	Juru Pengairan Bendung Hulu	D.I. Bendung Hulu	Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur	Pemenang II
3	Sofyan	Juru Pengairan Sp.I	D.I. Kali Bumi	Provinsi Papua, Kabupaten Nabire	Pemenang III
4	Tuna Kadir A.	Juru Pengairan Hunggalue	D.I. Hunggalue	Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo	Harapan I

NO.	NAMA JURU/MANTRI IRIGASI (KELOMPOK II)	JABATAN	DAERAH IRIGASI	PROVINSI/ KABUPATEN	KEDUDUKAN
5	Gusti Ngurah Semara Jaya	Juru Pengairan Wilayah Kecamatan Payangan	D.I. Buahan	Provinsi Bali, Kabupaten Gianyar	Harapan II

 **MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,**

BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR : 957/KPTS/M/2016

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA PEMILIHAN

PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN

JARINGAN IRIGASI DAN RAWA TELADAN

TINGKAT NASIONAL UNTUK UNIT PELAKSANA

TEKNIS DAERAH/PENGAMAT, JURU/MANTRI

--- PENGAIRAN, KOMUNITAS PEDULI SUNGAI

TINGKAT NASIONAL, PETUGAS UNIT PENGELOLA

BENDUNGAN, SERTA PETUGAS OPERASI DAN

PEMELIHARAAN BENDUNGAN TELADAN

TINGKAT NASIONAL TAHUN 2016

NO.	NAMA UPTD/PENGAMAT RAWA	JABATAN	DAERAH IRIGASI	PROVINSI/ KABUPATEN	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5	6
1	I Kadek Suardiyana	Pengamat Pengairan Daerah Irigasi Rawa Oyom Lampasio	D.I.R. Oyom Lampasio	Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Toli-Toli	Pemenang I
2	Sirajuddin	Pengamat Irigasi Tambak Poleang	D.I.T. Watubangga	Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Bombana	Pemenang II
3	Mulyo Sutopo	Kepala UPTD Rawa Seputih Surabaya	D.I.R Seputih Surabaya	Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah	Pemenang III
4	Rusdianto	Pengamat Pengairan Daerah Irigasi Rawa Semangga Dan Tanah Miring	D.I.R. Semangga, Tanah Miring	Provinsi Papua, Kabupaten Merauke	Harapan I

NO.	NAMA UPTD/PENGAMAT RAWA	JABATAN	DAERAH IRIGASI	PROVINSI/ KABUPATEN	KEDUDUKAN
5	Darwadi, ST	Pengamat Daerah Irigasi Rawa Belawang	D.I.R. Belawang	Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala	Harapan II

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR : 957/KPTS/M/2016

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA PEMILIHAN
PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN
JARINGAN IRIGASI DAN RAWA TELADAN
TINGKAT NASIONAL UNTUK UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH/PENGAMAT, JURU/MANTRI
PENGAIRAN, KOMUNITAS PEDULI SUNGAI
TINGKAT NASIONAL, PETUGAS UNIT PENGELOLA
BENDUNGAN, SERTA PETUGAS OPERASI DAN
PEMELIHARAAN BENDUNGAN, TELADAN
TINGKAT NASIONAL TAHUN 2016

NO.	NAMA JURU/MANTRI RAWA	JABATAN	DAERAH IRIGASI	PROVINSI/ KABUPATEN	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5	6
1	Sutaji	Juru Pengairan Wilayah Pengamat II	D.I.R. Telang	Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin	Pemenang I
2	Labeluru Dungga	Juru Irigasi Rawa Saembalawati II	D.I.R. Saembalawati	Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Poso	Pemenang II
3	Endang Lestari	Juru Pengairan Semangga I Dan 2	D.I.R. Semangga	Provinsi Papua, Kabupaten Merauke	Pemenang III
4	Idar Asmara	Mantri Sp IV, Sp V	D.I.R. Seputih Surabaya	Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah	Harapan I

NO.	NAMA JURU/MANTRI RAWA	JABATAN	DAERAH IRIGASI	PROVINSI/ KABUPATEN	KEDUDUKAN
5	Suparman	Juru Kolam Kiri Dalam	D.I.R. Belawang	Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala	Harapan II



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR : 957/KPTS/M/2016

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA PEMILIHAN
PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN
JARINGAN IRIGASI DAN RAWA TELADAN
TINGKAT NASIONAL UNTUK UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH/PENGAMAT, JURU/MANTRI
PENGAIRAN, KOMUNITAS PEDULI SUNGAI
TINGKAT NASIONAL, PETUGAS UNIT PENGELOLA
BENDUNGAN, SERTA PETUGAS OPERASI DAN
PEMELIHARAAN BENDUNGAN TELADAN
TINGKAT NASIONAL TAHUN 2016

NO.	NAMA KOMUNITAS	PROVINSI	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1	Masyarakat Peduli Sungai (Melingai)	Kalimantan Selatan	Pemenang I
2	Forum Komunikasi Winongo Asri (FKWA)	DI Yogyakarta	Pemenang II
3	Paguyuban Pengendali Dan Penanganan Air Pasang Panggung Lor (PSI), Kota Semarang	Jawa Tengah	Pemenang III
4	Ekolink	Jawa Barat	Harapan I
5	Santri Jogo Kali	Jawa Timur	Harapan II
6	Komunitas Peduli Sungai Batu Bulan	Maluku	Harapan III

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN VIII


KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR : 957/KPTS/M/2016

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA PEMILIHAN
PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN
JARINGAN IRIGASI DAN RAWA TELADAN
TINGKAT NASIONAL UNTUK UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH/PENGAMAT, JURU/MANTRI
PENGAIRAN, KOMUNITAS PEDULI SUNGAI
TINGKAT NASIONAL, PETUGAS UNIT PENGELOLA
BENDUNGAN, SERTA PETUGAS OPERASI DAN
PEMELIHARAAN BENDUNGAN TELADAN
TINGKAT NASIONAL TAHUN 2016

NO.	NAMA UNIT PENGELOLA BENDUNGAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1	BWS Nusa Tenggara I Ir. Lalu Rahmanhadi, MM	Pemenang I
2	BBWS Cimanuk Cisanggarung Dodo Wadoyo, ST	Pemenang II
3	BWS Kalimantan III Yuwana, ST	Pemenang III

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN IX


KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR : 957/KPTS/M/2016

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA PEMILIHAN
PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN
JARINGAN IRIGASI DAN RAWA TELADAN
TINGKAT NASIONAL UNTUK UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH/PENGAMAT, JURU/MANTRI
PENGAIRAN, KOMUNITAS PEDULI SUNGAI
TINGKAT NASIONAL, PETUGAS UNIT PENGELOLA
BENDUNGAN, SERTA PETUGAS OPERASI DAN
PEMELIHARAAN BENDUNGAN TELADAN
TINGKAT NASIONAL TAHUN 2016

NO.	NAMA PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN BENDUNGAN	BENDUNGAN	BALAI	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
1	Purwanta, ST	Kedung Ombo	BBWS Pemali Juana	Pemenang I
2	Ahmad Mansubun Z.	Darma	BBWS Cimanuk Cissanggarung	Pemenang II
3	Nasaruddin, ST	Bili-Bili	BBWS Pompengan Jeneberang	Pemenang III

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN X

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR : 957/KPTS/M/2016

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA PEMILIHAN
PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN
JARINGAN IRIGASI DAN RAWA TELADAN
TINGKAT NASIONAL UNTUK UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH/PENGAMAT, JURU/MANTRI
PENGAIRAN, KOMUNITAS PEDULI SUNGAI
TINGKAT NASIONAL, PETUGAS UNIT PENGELOLA
BENDUNGAN, SERTA PETUGAS OPERASI DAN
PEMELIHARAAN BENDUNGAN TELADAN
TINGKAT NASIONAL TAHUN 2016

NO.	NAMA PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN BENDUNGAN	BENDUNGAN	BALAI	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
1	Heru P.	Delingan	BBWS Bengawan Solo	Pemenang I
2	Abdur Rachman, SAP	Tiu Kulit	BWS Nusa Tenggara I	Pemenang II
3	Jarot Hari Wibowo	Manggar	BWS Kalimantan III	Pemenang III

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN XI

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR : 957/KPTS/M/2016

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA PEMILIHAN
PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN
JARINGAN IRIGASI DAN RAWA TELADAN
TINGKAT NASIONAL UNTUK UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH/PENGAMAT, JURU/MANTRI
PENGAIRAN, KOMUNITAS PEDULI SUNGAI
TINGKAT NASIONAL, PETUGAS UNIT PENGELOLA
BENDUNGAN, SERTA PETUGAS OPERASI DAN
PEMELIHARAAN BENDUNGAN TELADAN
TINGKAT NASIONAL TAHUN 2016

NO.	NAMA PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN BENDUNGAN	BENDUNGAN	BALAI	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
1	Ni Kadek Puspitasari	Telaga Tunjung	BWS Bali Penida	Pemenang I
2	Misbakhudin	Panohan	BBWS Pemali Juana	Pemenang II
3	Darsono	Song Putri	BBWS Bengawan Solo	Pemenang III

